



# Swantara

Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 35 TAHUN IX/DESEMBER 2020

## LAPORAN UTAMA

# PANDEMI COVID-19 PENGARUHI GEOPOLITIK DUNIA

## PROFIL

**Rahmat Pribadi,**

Jangan Membenarkan Yang Biasa, Tapi Membiasakan Yang Benar

## SEPUTAR KITA

Lemhannas RI Gelar Jakarta Geopolitical Forum 2020

## HOT NEWS

Zona Merah Bertambah, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan



29 November 2020

# DIRGAHAYU KORPRI



**KORPRI:**  
Berkontribusi  
Melayani dan  
Mempersatukan Bangsa



**PELINDUNG** AGUS WIDJOJO

**PEMBINA** WIEKO SYOFYAN

**PENGARAH** DIDID WIDJANARDI

**PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI**

SUGENG SANTOSO

**PENYUNTING/EDITOR** BAMBANG IMAN ARYANTO

**DESAIN GRAFIS** ARINI MAULIDIA

**FOTOGRAFER** SUYONO

**SEKRETARIAT** ENDAH HELIANA, GATOT, MAULIDA  
ARBANINGSIH, YUSNADI, AIDHA SAHLA ADIWIDYA

**PENULIS ARTIKEL** MAGISTA DIAN FITRILIA, WIA YUNIA  
PUTRI, NAOMI AUGUSTINA

**ALAMAT REDAKSI** BIRO HUMAS LEMHANNAS RI  
JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110

**TELP.** (021) 3832108, 3832109

**FAX.** (021) 3451926

**EMAIL :** [humas@lemhannas.go.id](mailto:humas@lemhannas.go.id)

**WEBSITE :** [www.lemhannas.go.id](http://www.lemhannas.go.id)

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR  
LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA  
SESUAI DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI

## Salam Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Om Swastiastu

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya Majalah Swantara Edisi ke-35, Desember 2020, telah hadir di tengah-tengah kita.

Pada edisi kali ini, Majalah Swantara masih tetap menghadirkan beberapa rubrik yang menyajikan informasi dari berbagai sudut pandang yang dapat mengedukasi bagi para pembaca, serta dapat memberikan pesan yang sarat makna kepada para pembaca.

Dalam edisi kali ini redaksi mengangkat salah satu gelaran kegiatan yang merupakan salah satu program tahunan Lemhannas RI yakni Jakarta Geopolitical Forum yang mengangkat perubahan geopolitik di masa pandemi Covid-19 dalam rubrik Laporan Utama yang dapat dijadikan referensi para pembaca.

Selain itu, redaksi juga mengangkat pemberitaan seputar kegiatan Lemhannas RI diantaranya Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61 dan Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 11 Lemhannas RI. Selain itu, juga ada beberapa informasi terkait dengan berbagai kegiatan dilakukan Lemhannas RI.

Tak hanya itu, juga menghadirkan rubrik Profil Pejabat dan Pegawai, Suara Peserta, Hot News, Ragam serta esai terbaik yang dapat menjadi pilihan sebagai referensi dan sekaligus menambah khasanah pengetahuan bagi pembaca setia Majalah Swantara.

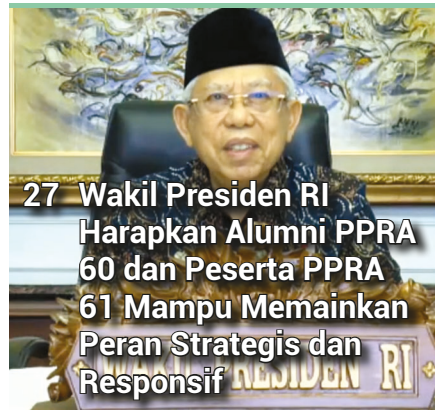
Tak ada gading yang tak retak, redaksi menyadari Majalah Swantara ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, redaksi mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca demi eksistensi dan kemajuan karya jurnalistik yang disajikan pada edisi berikutnya.

Tak lupa redaksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi 35 kali ini. Semoga, Majalah Swantara tetap berkesan di hati para pembaca.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om

# Daftar Isi



- 43 ARYA PAMBUDI  
Lemhannas RI Butuh Lebih  
Banyak Millennial
- HOT NEWS
- 46 Zona Merah Bertambah, Tetap  
Patuhi Protokol Kesehatan
- 47 PBB: Dunia Hadapi Krisis  
Kemanusiaan Terburuk Sejak  
PD II
- RAGAM
- 48 Apa itu Kacamata  
Photochromic?
- 49 Mengenal Beragam Makna  
dan Tradisi di Jatiluwih, dan  
Sekitar Tabanan, Bali
- SUARA PESERTA
- 50 Sinergitas Pusat dan Daerah  
adalah Kunci Tangani Pandemi
- 51 Pembelajaran Aplikatif sesuai  
Perspektif Kedaerahan
- ESAI TERBAIK
- 52 Sinergi Pusat dan Daerah  
Menuju New Normal Pandemi  
Covid-19 Untuk Keselamatan  
Seluruh Bangsa
- 56 GALLERY

- 22 Olah Sismennas, Simulasi  
Sinkronisasi Kebijakan  
Nasional Lintas Sektoral
- 23 Ilmu Sosial dan Politik  
Mampu Menjangkau Akar  
Permasalahan Fenomena  
Manusia
- 25 Di Tengah Pandemi Covid-19,  
Lemhannas RI Tetap  
Selenggarakan P3DA 11
- 26 90 Istri dan 6 Suami Peserta  
PPRA 61 Ikuti Penataran

- 32 Transformasi Ekonomi  
Merupakan Kunci Indonesia  
Keluar dari *Middle Income  
Trap*
- 34 Upaya Pemulihan Ekonomi  
Nasional melalui UMKM
- 36 Agus Widjojo: Janganlah  
Bekerja Bertujuan Untuk Jadi  
Pahlawan, Bekerjalah dengan  
Sepenuh Hati
- 38 Penguatan Kapasitas  
Personel Lemhannas RI Dalam  
Memasuki Era Industri 4.0



**DIRGAHAYU  
TENTARA  
NASIONAL  
INDONESIA**

5 Oktober 2020



# Pandemi Covid-19 Pengaruhi Geopolitik Dunia

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak bagi lingkungan geopolitik serta keamanan global dan regional. Hal tersebut juga memperkuat persaingan kekuatan besar yang ada di kawasan Indo Pasifik sehingga meningkatkan ketegangan atas masalah perbatasan wilayah seperti yang diperebutkan di Laut Cina Selatan. Pada masa pandemi Covid-19 kompleksitas dan ketidakpastian telah muncul sehingga sulit untuk memprediksi risiko dan peluang serta menemukan solusinya.

Dengan penyebarannya yang pesat dan meluas, Covid-19 ini telah membuat tatanan dunia mengalami transformasi yang signifikan, baik dalam hal perubahan sikap masing-masing negara terhadap pandemi tersebut. Mitigasi dan mobilisasi keputusan bersama organisasi internasional pun sangat dibutuhkan untuk mengatasi pandemi ini. Hanya negara yang memiliki ketahanan nasional yang kuat mungkin lebih siap untuk mengantisipasi pandemi, sementara beberapa negara lain cenderung bergantung pada negara yang lebih besar atau organisasi internasional. Menariknya, pada saat yang bersamaan, negara-negara besar terus menggunakan kekuatan mereka dalam persaingannya, baik secara ekonomi maupun militer, demi memperluas lingkup pengaruh mereka.

Negara-negara di berbagai kawasan saat ini tengah terjebak antara kebutuhan untuk segera menangani dampak dari pandemi Covid-19 atau menghindari terjebak dalam persaingan negara-negara besar. Seluruh negara di berbagai kawasan harus tetap fokus untuk melindungi kepentingan nasional mereka dan memperkuat ketahanan nasionalnya.

Saat ini, negara-negara kawasan memandang perlu atau tidaknya untuk mengubah, menyesuaikan, atau merumuskan kembali kebijakan nasional agar dampak penyakit dan persaingan negara-negara besar tidak merugikan program pembangunan masing-masing, khususnya dalam penguatan ketahanan manusia. Pertimbangan yang cermat atas semua kemungkinan dan peluang perlu dipertimbangkan secara serius untuk menghasilkan kebijakan terbaik untuk diterapkan. Namun, penting untuk dipegang bahwa fokus pada ketahanan nasional sendiri dan menyesuaikan dengan pengaturan geopolitik “baru” harus datang dengan semangat meningkatkan kesamaan dengan negara-negara kawasan.

Dr. Gita Wirjawan menilai bahwa

saat ini peradaban telah berubah. Kehidupan manusia yang bergantung pada pemanfaatan tanah dan besi berganti menjadi pemanfaatan data dalam berbagai bidang termasuk ekonomi. Di saat yang bersamaan, dunia yang bipolar berubah menjadi multipolar sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Apalagi saat ini dengan merebaknya Covid-19, telah merubah kehidupan manusia secara keseluruhan.

“Dunia Pasca Covid-19 akan diwarnai oleh berbagai hal seperti penurunan pertumbuhan ekonomi karena menurunnya jumlah permintaan, penurunan produktifitas karena adanya gangguan pada rantai pasokan, peningkatan hutang pada level nasional, perusahaan bahkan perorangan, adanya model bisnis yang lebih menggunakan paradigma digital atau virtual, peningkatan penyimpangan antara pasar uang / modal dan ekonomi riil, deflasi ‘Super Cycle’ yang disebabkan oleh pemberdayaan teknologi yang semakin mengganggu dan terjangkau, demografi yang semakin tua dan non-konsumtif serta mencetak uang, dan peningkatan aspirasi setiap negara untuk menjadi bagian dari deglobalisasi rantai pasokan dan adanya *decoupling* era yang ditandai dengan bangkitnya Tiongkok secara ekonomi dan secara Geopolitik,” jelas Gita

### **Pandemi Covid-19 dan Militansi di Asia Tenggara**

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, Terrorism and Security Risk Analyst, Judith Jacob mengatakan ada perdebatan di dunia maya yang dilakukan oleh para beberapa kelompok ekstrimis. Mereka memperdebatkan kemungkinan Covid-19 sebagai akhir dari dunia sehingga mereka mengurangi kegiatan operasi mereka yang mendorong turunnya aktivitas militansi. Namun, keadaan ini tidak akan berlangsung lama saat kelompok ekstrimis mulai menyadari bahwa Covid-19 bukan tanda akhir dunia dan mereka kembali

melakukan aksi militansinya.

Sementara Open-Source Intelligence Specialist di Janes, Mark Wilson, telah mengamati bahwa kelompok militan di Asia Tenggara telah mendeklarasikan gencatan senjata. Namun hal itu tak berlangsung lama, setelah kembali diamati oleh Janes, kelompok militan masih tetap melakukan operasi mereka dengan frekuensi yang sama seperti sebelum pandemi Covid-19. Mark Wilson menuturkan bahwa adanya Covid-19 pandemi ini tidak membuat kelompok militan menghentikan operasi mereka. Kelompok militan masih merebut senjata milik pasukan keamanan yang berjaga di wilayah operasi mereka dan menyebarkan propaganda.

Mark juga mengatakan bahwa kelompok militan di Asia Tenggara juga melakukan operasi secara virtual (online). Mereka, jelas Mark Wilson, menggunakan situs web dan media sosial untuk memanfaatkan Pandemi Covid-19. Mark Wilson menilai bahwa kelompok militan di Asia Tenggara akan terus mengejar tiga jalur respon terhadap pandemi seperti lakukan serangan untuk menguji ketahanan pihak berwenang, mencoba meningkatkan kurangnya kepercayaan publik pada pemerintah dengan menyoroti kekurangan pemerintah dalam menanggapi Covid-19, dan meningkatkan kepercayaan publik pada kemampuan kelompok militan untuk memerintah dengan menyediakan program dukungan Covid-19 untuk wilayah yang membutuhkan.

### **Geopolitik dan Pandemi Covid-19**

Herry Kemsley OBE, President, Govt & National Security di Janes melihat bahwa sejak perang dunia kedua, kebijakan hubungan internasional didominasi oleh bilateralisme dan unilateralisme dibandingkan dengan multilateralisme. Namun saat ini, mulilateralisme, menurut Kemsley, memiliki banyak

kelebihan seperti membawa hasil yang lebih baik, adanya legitimasi dan dukungan multilateral, dan memberikan kesempatan bagi negara kecil untuk berbagi beban dalam hal *soft/hard military*.

Kemsley berpendapat bahwa ada berbagai tantangan multilateralisme dalam konteks keamanan & ketahanan nasional yaitu negara multinasional yang bergabung menjadi satu yang mengharuskan penyatuan persepsi mengenai ancaman. Jika tidak tercapai satu persepsi yang sama, maka kekuatan massal yang diharapkan untuk menghadapi tantangan atau ancaman besar tidak akan tercapai.

Akibat dari pandemi saat ini, lanjut kemsley, adalah adanya tingkat ketidakpastian dalam ketahanan nasional. Berdasarkan Analisa Resiko dan peluang pasca pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh World Economic Forum terdapat beberapa kemungkinan resiko yaitu akan terjadi resesi ekonomi global dalam bidang ekonomi, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menghadapi Covid-19, adanya eksploitasi masalah Covid-19 sebagai salah satu keuntungan geopolitik dan memperburuk konflik berkepanjangan

antara Amerika Serikat dan Tiongkok, terdapat resiko sabotase data karena adanya sistem bekerja dari rumah, dan adanya tantangan terhadap ketahanan investasi jika tidak segera diatasi

Sementara Rukmani Gupta menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan signifikan pada geopolitik global akibat pandemi Covid-19, salah satunya adalah mempercepat tren geopolitik yang ditandai dengan adanya tantangan terhadap tatanan dunia liberal sehingga terjadi penurunan landasan normatif, adanya tantangan terhadap tatanan berbasis aturan yang dilihat sebagai cara yang lebih tepat dalam menghadapi pandemi, serta model pembangunan liberal barat yang kini dipertanyakan.

Selain itu, menurut Rukmani, pandemi Covid-19 juga mempercepat terkikisnya multilateralisme sehingga mengakibatkan bangkitnya nasionalisme dan bilateralisme ekonomi dalam pengaturan perdagangan, adanya upaya untuk membentuk narasi global tentang Covid-19, serta munculnya prioritas kepentingan nasional dan pragmatism seperti larangan perjalanan dan pembatasan ekspor, akses terhadap vaksin.

## Pandemi Covid 19, Aspek Sosial Budaya dan Ekonomi

Melihat dinamika Geopolitik sebelum dan selama Pandemi Covid-19 bagi Prof. Dadan Umar Daihani telah berbeda. Dadan menyebut bahwa Pandemi Covid-19 menjadi batu ujian bagi kekuatan struktur organisasi internasional serta ketahanan nasional masing-masing negara.

Dadan mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 telah mendorong penurunan ketahanan nasional. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan Lemhannas RI, Indeks ketahanan nasional pada bulan Juli 2020 seolah kembali pada kondisi tahun 2015. Pembangunan yang dilakukan selama lima tahun sirna tersapu Covid-19 dalam waktu enam bulan. Dadan mendorong perlu adanya penyusunan strategi agar hubungan antar negara kembali pada tatanan yang diharapkan.

Saat ini, menurut Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting, Dimas Oky Nugroho, isu-isu sosial, politik, ekonomi, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan isu strategis kenegaraan lainnya saat ini semakin meluas, multi-aspek, lintas teritori, kompleks, dan terkait satu sama lain. Selain itu, fenomena media sosial dan partisipasi sosial politik netizen yang massif dan terkoneksi lintas batas sedang terjadi.

Pada aspek sosial budaya, menurut Dimas terjadi fenomena meningkatnya kekhawatiran, kesadaran dan perilaku hidup sehat dalam standarisasi dan protokol kesehatan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Munculnya potensi menguatnya peran dan kontrol negara (terhadap masyarakat), namun di saat yang sama memunculkan pula reaksi 'public criticism and demand' yang tinggi khususnya dari kalangan Civil Society dan anak muda juga menjadi salah satu fenomena pada aspek sosial budaya. Selain itu, aktivitas dan komunikasi publik juga semakin mengarah pada daring dan ketergantungan pada informasi, media







Foto. covid19.kaltimprov.go.id

sosial dan jaringan internet semakin tinggi.

Pandemi Covid 19 ini, lanjut Dimas, memberikan jeda sekaligus menandakan sebuah transisi, menimbulkan pengaruh kuat dalam berbagai aspek sosial-ekonomi (nasional, regional, global). Menurutnya, saat seperti ini, karakter kepemimpinan dan keterampilan bernegara/berdiplomasi menjadi aspek penting dalam mengantisipasi, mengelola serta mengatasi krisis dan tekanan (domestik maupun global).

Pada sosial ekonomi, sambung Dimas, isu dan survailitas ekonomi menjadi kunci, khususnya solusi kebijakan terhadap stagnasi dan pemulihan ekonomi, serta terkait aspirasi kalangan usaha yang berhadapan dengan isu populis tenaga kerja, pemerataan dan kesenjangan sosial. Dimas menyebutkan bahwa efektivitas kebijakan stimulus, bantuan sosial, *refocusing* dan penyerapan anggaran pemerintah untuk menghidupkan atau menggerakkan sektor ekonomi riil harus digerakan. Terlebih lagi, munculnya kebutuhan untuk melakukan efisiensi, reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik serta penataan dan penguatan ketahanan pangan dan industri pertanian nasional juga harus dilakukan.

Sementara Enny Sri Hartati melihat ketahanan ekonomi Indonesia dapat diukur melalui lima aspek yaitu kemakmuran, keadilan, keamanan, kemandirian, dan daya saing dengan masing-masing indikatornya. Pada indikator daya beli masyarakat di dalam aspek kemakmuran, Enny menyatakan bahwa Indonesia mengalami deflasi secara persisten dalam tiga bulan berturut-turut hingga bulan September 2020 lalu yang menandakan bahwa inflasi disebabkan oleh adanya penurunan harga dari sisi suplai yang disebabkan oleh supply yang meningkat atau terjadi efisiensi yang menyebabkan oenurunan harga.

Sehingga Enny menilai bahwa jika jumlah pasokan atau penawaran meningkat atau harga produksi turun maka terjadi tingkat penurunan harga secara umum. Ia juga menuturkan bahwa pada saat pandemi seperti ini, hal tersebut mustahil terjadi. Maka dapat diartikan bahwa angka deflasi selama tiga bulan berturut-turut dikarenakan adanya persoalan pada sisi *demand* atau permintaan masyarakat yang tergerus.

Oleh karena itu, aspek sosial budaya dan ekonomi yang terdampak akibat pandemi Covid-19 perlu mendapat perhatian karena kedua aspek tersebut mengalami perubahan yang begitu besar ketika pandemi



**ada berbagai tantangan multilateralisme dalam konteks keamanan & ketahanan nasional yaitu negara multinasional yang bergabung menjadi satu yang mengharuskan penyatuan persepsi mengenai ancaman.**

Covid-19 menjadi bencana non alam di Indonesia. Kedua aspek ini menjadi indikator penting untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia saat ini. Pemerintah saat ini telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu memulihkan kedua aspek tersebut, baik ekonomi maupun sosial budaya. Tak hanya itu, pemerintah juga harus memperhatikan lingkungan geopolitik dunia saat pandemi Covid-19 dalam melakukan terobosan-terobosan guna mempercepat pemulihan kedua aspek yang terdampak.

# Lemhannas RI Gelar Jakarta Geopolitical Forum 2020



Lemhannas RI bekerjasama dengan MNC Group menggelar event tahunan Jakarta Geopolitical Forum (JGF) IV 2020 yang diselenggarakan selama 2 hari pada Rabu dan Kamis, 20 – 21 Oktober 2020 di MNC Conference Hall, Inews Tower.

**Foto.**  
humas-lhn  
Dok. Istimewa

**A** cara yang mengusung tema Geopolitical Landscape in The Covid-19 Era ini menghadirkan narasumber profesional dari dalam dan luar negeri. Penyelenggaraan acara ini didasari adanya perubahan terhadap sistem geopolitik akibat pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh belahan dunia. Pandemi Covid -19 adalah hal yang tak terduga bagi seluruh dunia.

Dampak dari pandemi ini bisa dirasakan di semua aspek kehidupan. Pengaruhnya juga dirasakan pada aspek sosial dan aspek keamanan negara. Karena itu, Lemhannas mendukung gagasan baik apapun itu untuk melakukan konsolidasi dengan membina dan bekerja sama antara negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara sekitar lainnya dalam menangani masalah dari dampak pandemi ini.

Dalam sambutan yang disiarkan secara virtual, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, di

tengah dinamika geopolitik kawasan dan global yang terkena imbas pandemi virus korona (Covid-19). Indonesia akan terus mendorong kerjasama dengan negara-negara lainnya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Terkait hal tersebut, Retno juga menyayangkan adanya sejumlah negara yang justru semakin memperluas pengaruhnya dan saling bersaing di tengah pandemi.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam kesempatan tersebut menyebutkan bahwa dalam konteks hubungan antarnegara, pandemi Covid-19 ini mempengaruhi lanskap geopolitik dalam banyak hal, dan keamanan adalah salah satu yang paling utama. Adapun tujuan dari JGF 2020 adalah untuk memberikan kesempatan bagi para praktisi geopolitik, profesional dan akademisi untuk bertukar pikiran dan pandangan mereka tentang lanskap geopolitik dunia di Era Covid-19.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden ke-11 RI (2009-2014) Prof. Dr. H. Boediono, B.Sc., M.Ec, Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno L.P. Marsudi, S.I.P., LL.M. Selain itu, JGF 2020 ini menghadirkan delapan pembicara yang berasal dari berbagai negara, yaitu Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan Pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2011-2014) (Indonesia), Sean Corbett, Royal Air Force (Inggris), Harry Kemsley, Obe, Vice President Of Janes (Inggris), Rukmani Gupta, Janes Senior Analyst For Asia Pacific Military Capabilities (India), Mark Wilson, Janes Threat Intelligence Consultant (Inggris), Judith Jacob, Terrorism and Security Risk Analyst (Inggris), Tate Nurkin, Senior Expert Scowcroft Center For Strategy And Security, Atlantic Council (USA), Anthony Davis, Sydney Morning Herald (Australia), Dadan Umar Daihani, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI (Indonesia).

Disrupsi yang terjadi di seluruh dunia dapat mengarah

pada pembentukan kembali politik kekuasaan, termasuk pertahanan dan keamanan. Untuk itu, JGF sebagai forum intelektual bagi para akademisi, praktisi, dan pemimpin dunia dapat menjadi wadah bagi para ahli berbagi ide-ide mereka untuk menciptakan tatanan dunia yang aman, sejahtera, dan beradab. Ada dua sub tema dalam forum tersebut yakni “Implikasi Strategis Covid-19 terhadap Geopolitik” serta “Implikasi Kebijakan dari Covid-19 dalam Konteks Ketahanan Nasional”.

Topik-topik tersebut diangkat dengan memperhatikan bahwa pandemi Covid-19 telah menghasilkan efek berlapis untuk lingkungan geopolitik serta keamanan global dan regional. Hal ini juga telah memperkuat persaingan kekuatan besar yang ada di seluruh Indo Pasifik dan meningkatkan ketegangan atas masalah perbatasan yang diperebutkan di Laut Cina Selatan. Akan tetapi di tengah pandemi, negara-negara besar seperti AS dan China sepertinya tidak cemas dengan risiko cepatnya penyebaran penyakit menular ini yang di wilayah tertentu sudah mencapai tingkat berbahaya. Baik AS dan China dianggap tetap fokus pada kepentingan mereka sendiri untuk memajukan pengaruh mereka dan bertujuan untuk dominasi strategis, khususnya di kawasan Tenggara. Selain itu, pada masa Covid-19 kompleksitas dan ketidakpastian akan muncul sehingga sulit untuk memprediksi risiko dan peluang serta menemukan solusinya.

Sementara itu, dengan penyebarannya yang pesat, Covid-19 ini telah membuat tatanan dunia mengalami transformasi yang cukup signifikan, baik dalam hal perubahan sikap negara terhadapnya. Mitigasi dan mobilisasi keputusan bersama organisasi internasional sangat dibutuhkan untuk mengatasi bencana ini. Dapat dilihat bahwa negara dengan ketahanan nasional yang kuat mungkin lebih siap untuk mengantisipasi pandemi, sementara beberapa negara lain cenderung



bersandar pada negara yang lebih besar atau organisasi internasional. Menariknya, pada saat yang bersamaan, negara-negara besar terus menggunakan persaingan di antara mereka, baik secara ekonomi maupun militer, demi memperluas lingkup pengaruh mereka.

Selain itu, negara-negara kawasan terjebak antara kebutuhan untuk segera meringankan dampak parah Covid-19 atau untuk menghindari terjebak oleh persaingan negara-negara besar. Negara-negara di kawasan harus tetap fokus untuk melindungi kepentingan nasional mereka dan memperkuat ketahanan nasional. Dalam kaitan ini, negara-negara kawasan akan memandang perlu untuk mengubah, menyesuaikan, atau merumuskan kembali kebijakan nasional agar dampak penyakit dan persaingan negara-negara besar tidak



merugikan program pembangunan masing-masing, khususnya dalam penguatan ketahanan manusia. Pertimbangan yang cermat atas semua kemungkinan dan peluang perlu dipertimbangkan secara serius untuk menghasilkan kebijakan terbaik untuk diterapkan. Namun, penting untuk dipegang bahwa fokus pada ketahanan nasional sendiri dan menyesuaikan dengan pengaturan geopolitik “baru” harus datang dengan semangat meningkatkan kesamaan dengan negara-negara kawasan.

Dengan diselenggarakannya forum internasional ini, diharapkan para pemangku kepentingan dan pemerintah dapat melakukan upaya yang terbaik dalam mempersiapkan diri untuk menaklukkan pandemi, juga untuk memperbaiki kerusakan, dan yang lebih penting untuk dapat memprediksi terulangnya kembali di masa depan. Forum ini dapat menjadi wadah diskusi dalam merumuskan ketahanan nasional dan strategi nasional agar mampu mengantisipasi situasi yang terburuk. Strategi seperti ini sangat penting untuk diterapkan demi kemajuan kepentingan nasional berdasarkan kondisi geopolitik terkini.



### “Geopolitical Landscape of Covid-19 Era”

Pembicara pertama pada sesi pertama, Dr. Gita Wirjawan mengungkapkan bahwa Asia Tenggara telah melalui berbagai macam peradaban dari 2000 tahun yang lalu termasuk Indonesia yang telah mengalami perubahan zaman sejak ajaran Budha masuk hingga saat ini yaitu era demokrasi. Di tengah perubahan zaman yang dinamis tersebut, Asia Tenggara dikenal sebagai wilayah yang damai dan stabil. Keadaan Asia Tenggara yang damai dan stabil sejak 2000 tahun lalu tersebut, jelas Gita Wirjawan,

memberikan pengaruh terhadap masa depan Asia Tenggara.

Gita Wirjawan menjelaskan bahwa saat ini peradaban telah berubah. Kehidupan manusia yang bergantung pada pemanfaatan tanah dan besi berganti menjadi pemanfaatan data dalam berbagai bidang termasuk ekonomi. Di saat yang bersamaan, dunia yang bipolar berubah menjadi multipolar sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Selain itu, terdapat pula perubahan iklim, penurunan nilai mata uang dan pergeseran ekonomi dan peradaban.

Terkait dengan Covid-19, Gita Wirjawan menjabarkan bahwa saat ini terdapat lebih dari delapan ratus ribu orang terjangkit Covid-19 di Asia Tenggara dan Indonesia menyumbang paling banyak kasus positif Covid-19 saat ini. Hal tersebut, jelas Gita Wirjawan, merubah kehidupan manusia secara keseluruhan.

Dunia Pasca Covid-19 menurut Gita Wirjawan akan diwarnai oleh berbagai hal seperti penurunan pertumbuhan ekonomi karena menurunnya jumlah permintaan, penurunan produktifitas karena

adanya gangguan pada rantai pasokan, peningkatan hutang pada level nasional, perusahaan bahkan perorangan, adanya model bisnis yang lebih menggunakan paradigma digital atau virtual, peningkatan penyimpangan antara pasar uang / modal dan ekonomi riil, deflasi "Super Cycle" yang disebabkan oleh pemberdayaan teknologi yang semakin mengganggu dan terjangkau, demografi yang semakin tua dan non-konsumtif serta mencetak uang, dan peningkatan aspirasi setiap negara untuk menjadi bagian dari deglobalisasi rantai pasokan dan adanya decoupling era yang ditandai dengan bangkitnya Tiongkok secara ekonomi dan secara geopolitik.

Kebangkitan Tiongkok dan Asia setelah 200 tahun terakhir menunjukkan ekonomi Asia yang mencapai 50 persen dari ekonomi global dan membuat banyak perubahan. Gita Wirjawan berpendapat bahwa ekonomi Asia Tenggara akan terus mengalami peningkatan pada beberapa tahun ke depan dan akan membawa perubahan lebih besar pada tatanan dunia.

Gita Wirjawan menjabarkan bahwa selama decoupling era antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, Asia Tenggara diharuskan beradaptasi dengan keadaan tersebut. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara adalah dengan meningkatkan produktivitas marjinalnya. Negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Filipina, Kamboja, Malaysia, dan Myanmar, jelas Gita Wirjawan, telah meningkatkan kebutuhan produktivitas marjinalnya. Selain itu, negara-negara Asia Tenggara juga diharapkan mampu meningkatkan keterjangkauan finansial, meningkatkan fokus pada investasi dan pariwisata sebagai "soft power", dan menurunkan Rasio Gini untuk wilayah secara berkelanjutan.

Gita Wirjawan menyampaikan beberapa pandangannya mengenai Indonesia di tahun 2045 dalam kesetaraan ekonomi. Diperkirakan pada tahun 2045, Indonesia akan

menjadi negara dengan GDP terbesar ke-4 di dunia dengan GDP sebesar US\$11.4 triliun dengan GDP per kapita sebesar US\$35,800. menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yaitu 320 juta penduduk, memiliki 2 juta kilometer jalan raya, memiliki 1 juta megawatt pasokan listrik, serta peningkatan jumlah dokter.

Sementara itu pada kesetaraan politik, geopolitik, dan sosial, Gita Wirjawan mengatakan bahwa sebagai negara dengan demokrasi yang sedang berkembang menjadi negara dengan demokrasi terbesar ke-3 di dunia, memiliki Rasio Gini sebesar 30 persen, menjadi negara yang damai dan stabil, dan memiliki sistem perlindungan data. Selain itu, Indonesia juga akan berfokus pada "soft power" dengan menduduki peringkat ke-5 dalam perolehan medali dalam olimpiade, mendapatkan 10 Penghargaan Nobel, menjadi juara Piala Dunia 2045, dan menjadi negara pusat musik dangdut di dunia.



### Implikasi Strategis Covid-19 terhadap Geopolitik

Herry Kemsley OBE, President, Govt & National Security di Janes sebagai pembicara kedua dalam sesi pertama mengungkapkan bahwa sejak perang dunia kedua, kebijakan hubungan internasional didominasi oleh bilateralisme dan unilateralisme dibandingkan dengan multilateralisme. Di sisi lain, unilateralisme, lanjut

Kemsley, memiliki banyak kelebihan seperti membawa hasil yang lebih baik, adanya legitimasi dan dukungan multilateral, dan memberikan kesempatan bagi negara kecil untuk berbagi beban dalam hal *soft/hard military*.

Kemsley kemudian mengatakan bahwa terdapat berbagai tantangan multilateralisme dalam konteks keamanan & ketahanan nasional yaitu negara multinasional yang bergabung menjadi satu diharuskan menyesuaikan perbedaan dengan negara lain dalam hal persepsi ancaman. Jika tidak tercapai satu persepsi yang sama, maka kekuatan masal yang diharapkan untuk menghadapi tantangan atau ancaman yang besar tidak akan tercapai.

Selain itu, menyamakan konsensus tentang kemungkinan di masa depan dan tujuan multilateral juga menjadi salah satu tantangan multilateralisme dalam konteks keamanan. Adanya masalah dalam kerja sama di bidang pertahanan dan kemananan seperti masalah kedaulatan serta kurangnya kepercayaan dan keengganan untuk mengizinkan kontrol militer pusat juga menjadi tantangan tersendiri.

Kemsley juga menyatakan bahwa dalam unilateralisme, banyak ditemukan adanya dua negara yang bersaing secara bilateral dan mendominasi agenda atau kepentingan multilateral. Hal tersebut, lanjut Kemsley, harus dicegah agar tujuan multilateralisme dapat tercapai. Kemsley juga menuturkan bahwa kompromi dalam hal kontrol politik, diplomatik dan militer diperlukan dalam mencapai tujuan multilateralisme.

Salah satu akibat dari pandemi saat ini, lanjut Kemsley, adalah adanya tingkat ketidakpastian dalam ketahanan nasional. Berdasarkan Analisa Resiko dan peluang pasca pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh World Economic Forum terdapat beberapa kemungkinan resiko yaitu akan terjadi resesi ekonomi global dalam bidang ekonomi, adanya

ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menghadapi COVID-19, adanya eksploitasi masalah COVID-19 sebagai salah satu keuntungan geopolitik dan memperburuk konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, terdapat resiko sabotase data karena adanya sistem bekerja dari rumah, dan adanya tantangan terhadap ketahanan investasi jika tidak segera diatasi

Kemsley menegaskan bahwa ketahanan nasional saat ini berfokus pada hal-hal diluar tantangan pandemi saat ini. Pandemi saat ini, jelas Kemsley, bertentangan dengan megatrend, pendorong strategis dan dinamika keamanan. Di sisi lain, terdapat kemungkinan peluang di masa depan yang ditentukan dari berbagai macam ketidakpastian seperti adanya multilateralisme atau unilateralisme, pergeseran prioritas militer, serta adanya negara-negara oportunis,

Kemsley memaparkan analisa kemungkinan masa depan dan ketahanan seperti adanya pergeseran politik dan geopolitik strategis, adanya analisis berjangka multilateral memungkinkan adanya prioritas bersama, adanya penelitian dan analisis multinasional dan multidisiplin untuk secara sistematis mengidentifikasi tujuan bersama, serta pembangunan protokol dan infrastruktur diplomatik dan politik.



Sedangkan Pembicara Ketiga pada sesi pertama, Senior Military Capabilities Analyst Rukmani Gupta memfokuskan pada pengaruh

pandemic Covid-19 terhadap geopolitik negara-negara di Asia terutama negara yang sedang mengalami sengketa teritorial dan maritime serta gambaran terhadap geopolitik di Asia di masa depan.

Rukmana Gupta menjelaskan bahwa adanya COVID-19 telah membawa perubahan signifikan pada geopolitik global salah satunya dengan mempercepat tren geopolitik yang menjadi bukti sebelum pandemi yang ditandai dengan tantangan terhadap tatanan dunia liberal yang telah ada yang mengakibatkan penurunan landasan normatif, adanya tantangan terhadap tatanan berbasis aturan yang dilihat sebagai cara yang lebih tepat dalam menghadapi pandemi, serta model pembangunan liberal barat yang dipertanyakan.

Selain itu, Covid-19 juga mempercepat terkikisnya multilateralisme berikutnya yang mengakibatkan bangkitnya nasionalisme dan bilateralisme ekonomi dalam pengaturan perdagangan, adanya upaya untuk membentuk narasi global tentang Covid-19, serta Prioritas kepentingan nasional dan pragmatism seperti larangan perjalanan dan pembatasan ekspor, akses terhadap vaksin.

Lebih lanjut, Rukmana Gupta menyebutkan bahwa pandemi ini juga memperburuk konflik Amerika Serikat dan Tiongkok dengan adanya tekanan ekonomi dalam hubungan kedua negara dalam negosiasi perdagangan, perselisihan diplomatik mengenaipihak yang bertanggungjawab atas pandemic Covid-19, dan meningkatnya ketegangan akibat adanya aktivitas militer Tiongkok di Indo-pacific

Tiga tren geopolitik global yang diperparah dengan adanya Covid-19, jelas Rukmana Gupta, menyebabkan tiga perkembangan penting di Asia terutama Asia Tenggara yaitu penegasan sentralitas Tiongkok dalam rancangan ekonomi di kawasan Asia, Klaim Teritorial kubu Tiongkok, serta kebangkitan persaingan geopolitik di Asia.

Penegasan sentralitas Tiongkok diawali dengan Amerika Serikat yang berfokus pada bilateralisme dan menarik diri dari perjanjian multilateral seperti TPP atau Kemitraan Trans-Pasifik yang mengukuhkan yang semakin mengukuhkan sentralitas Tiongkok dalam rancangan ekonomi Asia. Tiongkok secara berkesinambungan ikut serta dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) serta ikut serta dalam perjanjian dagang China Japan Korea (CJK).

Rukmana Gupta menyebutkan bahwa keberhasilan Tiongkok menanggulangi pandemi Covid-19 akan membuat ekonomi Tiongkok menjadi stabil lebih cepat dibanding dengan negara-negara lain dan saat ini, pemulihan ekonomi di Tiongkok sudah berjalan dengan baik. Pemulihan ekonomi Tiongkok juga mengindikasikan bahwa Tiongkok dapat memenuhi perjanjian investasinya sebagai bagian dari *Belt and Road Initiative* (BRI) dan dianggap sebagai pilihan pilihan paling layak untuk arus masuk modal di Asia.

Terkait isu akses vaksin Covid-19, Tiongkok memanfaatkan diplomasi vaksin atau vaccine diplomasi terhadap negara-negara di Asia Tenggara untuk mendapatkan keuntungan strategis. Selain itu, jelas Rukmana Gupta, terdapat Kekhawatiran yang berkepanjangan bahwa ketergantungan ekonomi akan dimanfaatkan oleh Tiongkok sebagai keuntungan politik.

Klaim teritorial kubu Tiongkok juga merupakan perkembangan geopolitik penting yang ditandai dengan adanya peningkatan aktifitas militer Tiongkok akibat dari keberhasilannya menanggulangi pandemic Covid-19, konsolidasi Kehadiran Tiongkok di Laut Cina Selatan, dan adanya tekanan militari yang besar kepada Taiwan oleh Tiongkok.

Perkembangan geopolitik penting yang ketiga adalah kebangkitan persaingan geopolitik di Asia yang mendorong negara-negara di Asia

Tenggara untuk “mengimbangi” Tiongkok dengan melibatkan negara-negara menengah atau *middle power* sebagai penyeimbang eksternal dan melakukan kerja sama yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran domain maritime.

Menutup paparannya, Rukmana Gupta menyebutkan bahwa di masa depan, kesenjangan yang semakin dalam antara ketergantungan ekonomi pada Tiongkok dan kekhawatiran atas ambisi militernya, Persaingan kekuatan besar yang semakin intensif hanya dapat dikelola melalui solusi multilateral – seperti COC ASEAN, pemulihan pasca pandemi akan berfokus pada kebangkitan domestik – akses ke vaksin serta pemulihan ekonomi, dan negara-negara di Asia akan semakin sulit untuk menyeimbangkan persyaratan keamanan eksternal ditambah dengan tantangan kebutuhan pemerintahan nasional



## Covid-19 dan Ekstremisme Kekerasan serta Militansi di Asia Tenggara

Pembicara kedua pada sesi dua, Terrorism and Security Risk Analyst, Judith Jacob menuturkan bahwa sejak Mei 2017, pusat kegiatan ekstrimis dan kelompok militan telah berpindah dari Indonesia ke pulau Sulawesi dan daerah Mindanao. Adanya kombinasi dari *push and pull factor* yang menjadikan pulau Sulawesi dan daerah Mindanao menjadi pusat terorisme saat ini. Hal tersebut merupakan hasil dari aksi melawan terorisme yang

efektif di negara lain. Sedangkan keberhasilan di Marawi, telah menghasilkan aktivitas militan yang menonjol disana. Wilayah tersebut juga ditetapkan sebagai provinsi oleh the Islamic State telah memberikan kredibilitas kepada para ekstrimis untuk beroperasi disana.

Menjaga wilayah dalam rangka mendapatkan kredibilitas dinilai penting tidak hanya bagi organisasi besar seperti the Islamic State, namun juga bagi organisasi ekstrimis lain di wilayah tersebut. Organisasi tersebut rela berpindah dan menetap di sebuah wilayah dan mereka rela mendonasikan uang serta sumber daya yang mereka miliki untuk berpindah. Namun, jelas Judith Jacob, mempertahankan wilayah juga memiliki keterbatasan.

Di luar Marawi, jelas Judith Jacob, organisasi ekstrimis telah terbagi-bagi secara fisik dan secara ideologi. Pasukan keamanan telah berhasil membunuh atau menangkap pemimpin organisasi ekstrimis. Selain itu, kelompok ekstrimis juga terbagi secara ideologi. Sebagian mendukung klaim the Islamic State sebagai pemimpin pergerakan dunia, namun sebagian lainnya memiliki perbedaan pandangan. Selain adanya konflik di dalam organisasi ekstrimis tersebut, mereka juga memiliki keterbatasan akses senjata dan dana akibat gabungan dari kegagalan organisasi ekstrimis. Mereka juga kesulitan mencari anggota baru dengan keterampilan yang mumpuni.

Judith Jacob menyatakan bahwa kelompok ekstrimis di Maritim Asia Tenggara memiliki tiga hal utama yaitu kekuasaan wilayah, persenjataan, dan dana. Mereka dinilai semakin mahir dalam melakukan serangan bom bunuh diri serta merakit bom dan berkoordinasi dengan sesama anggota organisasi tersebut. Selain itu, organisasi ekstrimis di Maritim Asia Tenggara juga memiliki jumlah anggota wanita yang turut aktif dalam melakukan serangan dan anggota dari luar daerah mereka yang semakin meningkat. Dalam hal pendanaan,

mereka juga sudah melakukan inovasi dengan melakukan pertukaran bitcoin sejak akhir Agustus lalu.

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, Judith Jacob mengatakan bahwa terdapat perdebatan di dunia maya yang dilakukan oleh para kelompok ekstrimis tersebut. Mereka memperdebatkan kemungkinan Covid-19 sebagai akhir dari dunia sehingga mereka mengurangi kegiatan operasi mereka yang mendorong turunnya aktivitas militansi. Namun, keadaan ini tidak akan berlangsung lama saat kelompok ekstrimis mulai menyadari bahwa Covid-19 bukan tanda akhir dunia dan mereka kembali melakukan kegiatan rutin mereka dan pasukan keamanan harus bersiap menghadapi hal tersebut.

Selain itu, Judith juga mengungkapkan bahwa adanya kegagalan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 mendorong para organisasi ekstrimis untuk menyebarkan propaganda kegagalan pemerintah dalam menghadapi Covid-19. Selain itu, akibat dari kegagalan negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Italia dalam menghadapi pandemi Covid-19 juga mendorong mereka untuk menyebarkan propaganda yang menyatakan Covid-19 merupakan hukuman dari Tuhan kepada negara barat. Propaganda anti Tiongkok juga disebarkan dengan narasi bahwa Covid-19 merupakan hukuman dari Tuhan atas ketidakadilan Tiongkok terhadap komunitas yang lebih lemah.

Di akhir paparannya, Judith menjabarkan bahwa adanya Covid-19 ini membuat organisasi ekstrimis dan militan melakukan operasi yang berbeda yaitu dengan melakukan program pengajaran yang menjangkau kampus-kampus atau sekolah di sekitar wilayah mereka yang terkurung karena adanya sistem karantina wilayah. Mereka juga kembali melakukan pelatihan tanpa gangguan dari pasukan keamanan yang telah dipindahtugaskan karena adanya pandemi Covid-19. Organisasi Ekstrimis dan militan juga

melakukan penggalangan dana untuk masyarakat di sekitar wilayah mereka memberikan dana kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan, serta membagikan makanan kepada masyarakat sekitar sebagai upaya untuk semakin dekat dengan masyarakat sekitar.

Judith juga mengatakan bahwa organisasi ekstrimis dan militan tersebut juga mencoba menyeberangi batas-batas wilayah. Selain itu pemerintah juga membebaskan narapidana dan pa mengkaji resikonya sebagai usaha untuk mengurangi kepadatan di dalam tahanan yang menyebabkan penyebaran Covid-19. Namun tanpa dikaji lebih dalam, jelas Judith Jacob, residivis terorisme yang turut dibebaskan dikhawatirkan dapat kembali bergabung ke organisasi militan mereka.



## Ekstrimisme dan militansi di Asia Tenggara selama Covid-19

Pembicara pertama pada sesi kedua, Open-Source Intelligence Specialist di Janes, Mark Wilson, mengungkapkan bahwa berdasarkan pengamatan yang dilakukan Terrorism & Insurgency Centre di Janes di awal pandemic Covid-19, kelompok militan di Asia Tenggara mendeklarasikan gencatan senjata. Namun, setelah kembali diamati oleh Janes, kelompok militan tetap melakukan operasi mereka dengan frekuensi yang sama seperti sebelum pandemic Covid-19. Mark Wilson menuturkan

bahwa adanya Covid-19 pandemi ini tidak membuat kelompok militan menghentikan operasi mereka. Kelompok militan masih merebut senjata milik pasukan keamanan yang berjaga di wilayah operasi mereka dan menyebarkan propaganda.

Selain itu, Mark mengatakan bahwa kelompok militan di Asia Tenggara juga melakukan operasi secara virtual (online). Mereka, jelas Mark Wilson, menggunakan situs web dan media sosial untuk memanfaatkan Pandemi Covid-19 dengan tiga acara. Pertama, kelompok militan menggambarkan pasukan militer sebagai pelanggar gencatan senjata terkait Covid-19. Kelompok militan di Asia Tenggara menyoroti “indiscriminate rocket attacks” atau “Serangan roket tanpa pandang bulu” yang dilakukan pasukan militer kepada warga sipil. Selain itu, mereka juga menyebarkan narasi bahwa pihak militer melihat pandemi Covid-19 sebagai “kesempatan” untuk mengalahkan kelompok militan. Kelompok militan juga menuduh pasukan militer melanjutkan operasi mereka di tengah pandemic Covid-19.

Kedua, mereka menggambarkan respon pemerintah terhadap pandemi Covid-19 yang dianggap tidak memadai. Kelompok militan di Asia Tenggara, jelas Mark Wilson, mengecam pemerintah atas pembelian peralatan militer selama Covid-19 dengan mengatakan bahwa “pemerintah menghamburkan dana publik” dan “masyarakat membutuhkan bantuan Kesehatan dan ekonomi selama Covid-19”. Kelompok militan juga menyebarkan narasi bahwa negara lebih peduli untuk mengobarkan perang dibandingkan dengan berperang melawan Covid-19.

Mark Wilson menyebutkan bahwa kelompok militan mengkritik Tindakan karantina wilayah (lockdown) yang dilakukan pemerintah. Salah seorang pemimpin militan di Asia Tenggara menganggap Tindakan karantina wilayah memperburuk Covid-19 karena hal tersebut dianggap mencegah

pengujian dan pengobatan serta menimbulkan masalah kelaparan bagi jutaan orang. Selain itu, jelas Mark Wilson, kelompok militan juga menggambarkan pemerintah sebagai “musuh masyarakat”. Mereka mengatakan bahwa masalah sebenarnya adalah tanggapan pemerintah terhadap pandemi Covid-19, bukan pandemi itu sendiri. Kelompok militan juga menggunakan narasi pemerintah untuk melawan pemerintah sendiri.

Yang terakhir adalah mereka menggambarkan kelompok militan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Kelompok militan mengklaim bahwa mereka telah menerapkan Langkah mitigasi Covid-19 di daerah yang mereka kuasai seperti program sanitasi, pendirian klinik di desa-desa, program penyuluhan Covid-19, dan kampanye penanaman bahan pangan untuk mengatasi masalah kelaparan di pedesaan karena adanya karantina wilayah.

Kelompok militan, lanjut Mark Wilson, juga telah menerbitkan panduan untuk penduduk lokal tentang cara melindungi diri dari Covid-19. Mereka juga telah menyebarkan propaganda yang menekankan latar belakang medis para pemimpin seniornya. Selain itu kelompok militan juga mengatakan akan bekerja sama dengan organisasi internasional dan negara tetangga untuk menanggulangi Covid-19. Semua itu, jelas Mark Wilson, ditujukan untuk memproyeksikan citra kelompok militan sebagai organisasi kredibel yang mengutamakan kepentingan penduduk lokal.

Di akhir paparannya, Mark Wilson mengungkapkan beberapa pandangannya yaitu kelompok militan di Asia Tenggara akan terus mengejar tiga jalur respon terhadap pandemi seperti lakukan serangan untuk menguji ketahanan pihak berwenang, mencoba meningkatkan kurangnya kepercayaan publik pada pemerintah dengan menyoroti kekurangan pemerintah dalam menanggapi Covid-19, dan meningkatkan



kepercayaan publik pada kemampuan kelompok militan untuk memerintah dengan menyediakan program dukungan Covid-19 untuk wilayah yang membutuhkan.



## Pengaruh Geopolitik Covid-19 Terhadap Ketahanan Nasional Gatra Politik, Sosial dan Budaya

Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting, Dimas Oky Nugroho yang menjadi pembicara pertama di hari kedua Jakarta Geopolitical Forum 2020 menyatakan dalam paparannya bahwa pandemi telah kembali menyadarkan umat manusia bahwa umat manusia adalah sebuah komunitas dunia yang saling terkoneksi tak hanya oleh persoalan ekonomi dan perdagangan, namun juga persoalan kesehatan dan berbagai aspek sosial kemanusiaan yang sama. Dimas menuturkan bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan sebuah penanda bahwa zaman telah bergerak dan negara harus bertahan dan melewati pergerakan bangsa ini dengan kemampuan dalam Konsolidasi, Inovasi, Adaptasi dan Transformasi (KIAT).

Saat ini, Isu-isu sosial, politik, ekonomi, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan isu strategis kenegaraan lainnya saat ini semakin meluas, multi-aspek, lintas teritori, kompleks, dan terkait satu sama lain. Selain itu, fenomena media sosial dan partisipasi sosial politik netizen yang massif dan terkoneksi lintas batas sedang terjadi. Terkait geopolitik, Dimas menuturkan bahwa

ketegangan dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan Asia Tenggara menjadi sentrum ketegangan terkait klaim kepemilikan Kawasan Laut Cina Selatan. Pandemi Covid 19 ini, lanjut Dimas, memberikan jeda sekaligus menandakan sebuah transisi, menimbulkan pengaruh kuat dalam berbagai aspek sosial-ekonomi (nasional, regional, global). Menurut Dimas, pada saat seperti ini, karakter kepemimpinan dan keterampilan bernegara/berdiplomasi menjadi aspek penting dalam mengantisipasi, mengelola serta mengatasi krisis dan tekanan (domestik maupun global).

Kluster pertama Covid-19 pertama diinformasikan oleh Tiongkok ke WHO pada Desember 2019 lalu. Pada Maret 2020 lalu, Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 dan PSBB diberlakukan secara resmi. Pada April hingga Mei 2020, perang pernyataan dan tuduhan antara para pejabat pemerintahan Amerika Serikat dan Tiongkok terkait penyebab kemunculan dan penyebaran Covid-19 terjadi. Sektor ekonomi nasional dan global mengalami kontraksi dan resesi diperkirakan hingga akhir tahun 2020. Saat ini, lanjut Dimas, upaya penelitian dan penemuan vaksin anti Covid-19 oleh negara-negara besar sedang terjadi.

Implikasi hal tersebut terhadap ketahanan nasional adalah terjadinya fenomena politik. Dimas mengatakan bahwa Asia Tenggara (LCS) adalah kawasan titik api potensial yang membuka kemungkinan benturan dua kekuatan militer besar. Lebih lanjut, adanya potensi perkembangan teknologi dan ekspansi digital yang menghadirkan era 'New Media' dan 'New Politics'. Pada sektor pemerintah, respon cepat dan tepat terhadap 'uncertainty', pengelolaan ekspektasi publik secara demokratis, sekaligus menjaga kepercayaan dan kewibawaan negara/pemerintah di mata publik sangat dibutuhkan. Selain itu, kepemimpinan dan konsolidasi segenap kekuatan politik nasional juga sangat dibutuhkan.

Pada sosial ekonomi, jelas Dimas, isu dan survailitas ekonomi menjadi kunci, khususnya solusi kebijakan terhadap stagnasi dan pemulihan ekonomi, serta terkait aspirasi kalangan usaha yang berhadapan dengan isu populis tenaga kerja, pemerataan dan kesenjangan sosial. Selain itu, adanya tuntutan terkait kesempatan dan akses lapangan kerja khususnya untuk korban PHK dan generasi muda angkatan kerja baru. Termasuk kebutuhan untuk memperluas industri (padat karya) dan penguatan UMKM (perijinan, permodalan, pendampingan dan akses pasar). Lebih lanjut, kesiapan dan adaptasi dalam transformasi menuju ekonomi kreatif berbasis digital harus disiapkan. Dimas menyebutkan bahwa efektivitas kebijakan stimulus, bantuan sosial, refocusing dan penyerapan anggaran pemerintah untuk menghidupkan atau menggerakkan sektor ekonomi riil harus digerakan. Terlebih lagi, munculnya kebutuhan untuk melakukan efisiensi, reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik serta penataan dan penguatan ketahanan pangan dan industri pertanian nasional juga harus dilakukan.

Dimas menjelaskan bahwa pada aspek sosial budaya, terjadi fenomena meningkatnya kekhawatiran, kesadaran dan perilaku hidup sehat dalam standarisasi dan protokol kesehatan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Munculnya potensi menguatnya peran dan kontrol negara (terhadap masyarakat), namun di saat yang sama memunculkan pula reaksi 'public criticism and demand' yang tinggi khususnya dari kalangan Civil Society dan anak muda juga menjadi salah satu fenomena pada aspek sosial budaya. Selain itu, aktivitas dan komunikasi publik juga semakin mengarah pada daring dan ketergantungan pada informasi, media sosial dan jaringan internet semakin tinggi.

Di akhir paparannya, Dimas menyimpulkan bahwa Pandemi Covid-19 berlangsung dengan

latar belakang ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok, Pandemi Covid-19 menjadi game changer yang berdampak pada melambatnya ekonomi, isu-isu dan tanggapan pemerintah menjadi masalah sekaligus tantangan, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan meyakinkan dan menggerakkan rakyat.

Selain itu, negara membutuhkan institusi dan sistem respon yang kokoh dan efektif, pemimpin transisional membutuhkan sebuah ikatan sosial dan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat sipil agar mendapatkan dukungan politik yang kokoh, partai politik harus berperan lebih baik untuk mewakili suara dan kepentingan rakyat, dan yang terakhir adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur harus dibarengi dengan pembangunan sosial budaya secara kreatif.



## Lansekap Geopolitik di Era Covid-19, Memikirkan Ulang Konsep Ketahanan Nasional

Pada akhir 2019, Covid-19 telah merebak di Wuhan. Covid-19 kemudian mulai menyebar di awal tahun 2020 di Thailand, Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat, Brazil, Amerika Selatan, Afrika, Australia dan tak terkecuali Indonesia dan dalam waktu tiga bulan, Covid-19 disebut pandemi global. Semua orang di dunia dapat terpapar Covid-19 tanpa pandang bulu.

Prof. Dadan Umar Daihani mengungkapkan bahwa beberapa negara teratas dengan jumlah pasien positif Covid-19 tertinggi di dunia berdasarkan data tanggal 6 Oktober 2020 yaitu Amerika Serikat yang

menduduki peringkat teratas, diikuti India, Brazil, Rusia, Kolumbia, dan Afrika Selatan. Kasus positif Covid-19 di seluruh dunia terus meningkat. Adanya kelalaian menyebabkan peningkatan kasus hingga mencapai kurang lebih 40 juta kasus positif Covid-19 pada tanggal 20 Oktober 2020 lalu. Maka dari itu, jelas Dadan, kita semua harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dadan menuturkan bahwa terdapat ancaman gelombang kedua Covid-19 akan melanda negara-negara di dunia. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penurunan jumlah kasus positif Covid-19 di Eropa namun kembali naik hingga saat ini. Hal serupa dengan pandemi Covid-19 ini juga pernah terjadi pada tahun 1918 yang dikenal dengan Spanish Flu yang menginfeksi hingga 50 juta orang. Dadan kemudian menjelaskan lebih lanjut mengatakan bahwa Covid-19 sangat berdampak pada kehidupan manusia karena Covid-19 tidak hanya menyerang manusia dari sisi kesehatan namun juga menyerang kondisi ekonomi, situasi politik, hingga sosial budaya.

Pandemi global yang berlangsung lama ini, jelas Dadan, akan menyebabkan kepanikan yang dirasakan secara global karena semua negara dihadapkan pada situasi yang sama seperti pemberlakuan pembatasan mobilitas dan jaga jarak atau *physical distancing*. Pemberlakuan peraturan tersebut menyebabkan resesi ekonomi. Di satu sisi, seluruh pihak diminta untuk menghentikan aktivitas sebagai upaya untuk memutus rantai infeksi. Di sisi lain, lanjut Dadan, pemerintah harus menyediakan kebutuhan seluruh rakyatnya seperti Kesehatan yang layak, ketersediaan pangan, dan juga energi dimana di saat yang bersamaan pertumbuhan dan pendapatan nasional turun secara signifikan.

Dinamika Geopolitik sebelum dan selama Pandemi Covid-19 juga sangat berbeda. Dadan menyebutkan bahwa Pandemi Covid-19 menjadi batu ujian bagi kekuatan struktur organisasi internasional serta ketahanan nasional masing-masing negara. Selain itu, Globalisasi saat ini sedang runtuh dan setiap negara berusaha menemukan cara untuk bertahan

hidup dan melindungi rakyatnya masing-masing. Globalisasi kehilangan kekuatan, manajemen negara kembali ke kebijakan yang berfokus pada kepentingan nasional dan ditengah semua ini, proteksionisme dan ultra-nasionalisme bangkit, pasar global hancur, dan kepercayaan pada faktor supra-nasional berkurang.

Covid-19, tutur Dadan, merupakan musuh bersama. Seluruh negara di dunia menghadapi tantangan yang sama yaitu berusaha menghentikan serangan Covid-19. Namun, hingga saat ini Kerjasama untuk memerangi Covid-19 belum terbentuk. Covid-19 menunjukkan bahwa manusia membutuhkan satu sama lain di manapun mereka berada. Namun, Dadan menyayangkan strategi politik yang diambil selama ini lebih menitikberatkan pada kelangsungan hidup individu bangsa yang membuat kepentingan politik suatu bangsa berada di atas kemanusiaan.

Terkait kondisi ketahanan nasional Indonesia, Dadan mengungkapkan bahwa Covid-19 mendorong penurunan ketahanan nasional berdasarkan pengukuran di Lemhannas RI. Indeks ketahanan nasional pada bulan Juli 2020 seolah kembali pada kondisi tahun 2015. Pembangunan yang dilakukan selama lima tahun sirna tersapu Covid-19 dalam waktu enam bulan. Dadan mendorong agar segera Menyusun strategi agar hubungan antar negara kembali pada tatanan yang diharapkan.

Pandemi Covid-19 akan mempercepat perpindahan kekuasaan dari barat ke timur secara geopolitik. Beberapa negara Asia seperti Korea Selatan, Hongkong, dan Singapura mampu beradaptasi dan mengendalikan pandemic dengan baik lebih dari beberapa negara. Setelah pandemi Covid-19 selesai, lanjut Dadan, sistem perpindahan kekuasaan dari barat ke timur saat menghadapi Covid-19 diperkirakan masih akan terus berlanjut dan menyebabkan perubahan tatanan geopolitik. Maka dari itu, Dadan mengatakan bahwa untuk bertahan hidup dan berkembang, negara-negara harus memikirkan kembali strategi ketahanan nasionalnya sehingga dapat menciptakan lansekap geopolitik yang baru.



## Membuka Pandora Box Keamanan Nasional

Pembicara kedua pada Hari Kedua JGF 2020, Tenaga Profesional bidang Strategi dan Hubungan Internasional dan Diplomasi Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan menuturkan bahwa keamanan nasional adalah *survival of the state* atau kelangsungan hidup negara. Maka dari itu, Indonesia harus mempertahankan keamanan nasionalnya di dunia dengan memiliki kemampuan untuk melindungi negaranya dari ancaman. Terkait dengan ancaman, Robert mengungkapkan bahwa ancaman terkait dengan *imminent loss* (kerusakan yang belum terjadi) terhadap *survival of the state*.

*Imminent loss* sendiri, jelas Robert, terdiri dari empat komponen yaitu *intention* yang dikalikan dengan *capability* yang berlangsung pada keadaan (*circumstance*) yang memungkinkan dan dikalikan lagi dengan kerawanan. *Intention* adalah negara yang punya kepentingan dan niat mengganggu *national interest* Indonesia seperti negara-negara *global leaders* yaitu geopolitik Amerika Serikat yang menggunakan *security approach by military means* dan Tiongkok dengan geopolitiknya menggunakan *prosperity approach by economic means*. Niat ini dapat terlaksana karena dua negara tersebut memiliki kemampuan (*capability*) seperti Amerika Serikat yang memiliki kemampuan militer, intelegen, diplomatik, hukum, informasi, keuangan, dan ekonomi.

Robert mengungkapkan bahwa

Amerika Serikat menggunakan unsur hukum (legal) untuk menciptakan *legal warfare* atau perang hukum seperti Indonesia diserang masalah kasasi dan masalah lingkungan. Ketahanan hukum Indonesia, jelas Robert, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memiliki banyak undang-undang dan peraturan. Namun, perlu ditinjau kembali apakah undang-undang atau peraturan tersebut tidak bersifat abu-abu. Maka dari itu, Robert menilai perlu disiapkan prajurit-prajurit untuk bertarung di medan perang hukum atau *legal warfare*. Di instrument keuangan, Amerika Serikat menyerang Indonesia pada tahun 1998 saat runtuhnya rezim Presiden Soeharto. Robert menegaskan bahwa kekuatan nyata Amerika Serikat tersebut sudah direncanakan sejak lama.

Sementara Tiongkok, lanjut Robert, memiliki kemampuan berupa *psychocultural*. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh Amerika Serikat dan digunakan oleh Tiongkok sebagai senjata dalam geopolitik. Selain itu, Tiongkok juga menggunakan kemampuan *media warfare* dengan menggunakan tiktok. Tiongkok juga menggunakan kemampuan keuangan, ekonomi, intelegen, dan yang tidak diketahui banyak pihak yaitu *benign force* seperti yang dilakukan di Laut Natuna. Tiongkok juga menyiapkan perang hukum dengan menyediakan lahan warfare di Laut Cina Selatan dan mengklaim kepemilikan Laut Cina Selatan.

Terkait dengan komponen keadaan atau *circumstance*, Robert mengatakan terdapat tiga poin yaitu adanya perubahan tatanan dunia, perang hibrida (*hybrid threat*), dan *greyzone warfare*. Robert mengatakan komponen kerawanan Indonesia yaitu geografi Indonesia yang sangat luas dan terdapat beribu-ribu pulau yang tidak berpenghuni, demografi, dan kekayaan alam. Pada kerawanan latent, Robert mengungkapkan terdapat tiga kiasan yaitu *sleeping with enemies* yaitu Indonesia cenderung mengundang musuh sendiri, *dancing*

*with the wolves* atau Indonesia suka berdansa dengan musuh sendiri, dan yang terakhir adalah *hanging to debt traps* yang berarti Indonesia berhutang dengan musuh.

Bicara soal realita, di tahun 2020 ini, Covid-19 menghantam sistem medis dan kesehatan yang memunculkan new normal, adaptasi kebiasaan baru, Pembatasan Sosial Berskala Besar. New Normal ini, jelas Robert, perlu standard yang jelas dan tidak terburu-buru agar tercipta keseragaman antar provinsi di Indonesia yang menyebabkan *new phase of uncertainty* atau babak baru ketidakpastian. Selain itu, Covid-19 juga menghantam fiskal. *Social Dynamic* atau reaksi sosial pun berbeda-beda. Terdapat pula infodemic yaitu adanya kesimpangsiuran informasi atau berita mengenai pandemic Covid-19 yang disebarkan oleh orang yang mengetahui fakta hingga yang tidak mengetahui fakta dan memaibkannya di antara *public policy* atau kebijakan publik dan *public trust* atau kepercayaan publik. Infodemic tumbuh subur di Indonesia. Robert mengkhawatirkan bahwa pandemi Covid-19 yang sebenarnya adalah isu medis menjadi perang politik dan pandemi Covid-19 ini merupakan instrumen geopolitik.

Robert berpesan agar tidak terlalu fokus hanya kepada pandemi CVODI-19 karena saat yang bersamaan, terdapat isu besar yang sedang berjalan seperti *trade war* atau perang dagang yang menjalar ke perang *control of point of production*, *control global supply chain*, dan *currency war* atau perang mata uang. Robert menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 ini mempengaruhi ekonomi global. Robert juga mengkhawatirkan Indonesia akan menjadi lahan peperangan kepentingan Amerika Serikat dan Tiongkok karena adanya freeport dan morowali.

Untuk menghindari Indonesia menjadi negara yang gagal, negara yang ringkih, negara yang rendah dan

negara yang lemah, sangat penting untuk membangun strategi keamanan nasional 2020–2024. Robert menyebutkan terdapat lima poin yaitu *lebensraum* yang berarti geopolitik Indonesia harus memberikan kenyamanan kepada bangsa Indonesia di antara jepitan dua geopolitik besar, Indonesia sebagai *centra gravitates* (pusat gravitasi) di Asean dan Indo-pasifik, ideologi bangsa yang jelas, integritas, dan *lingua securitas* atau satu bahasa dalam satu negara.



## Pengaruh Geopolitik Covid-19 terhadap Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi

Di awal paparannya, Pembicara Keempat Enny Sri Hartati menyatakan bahwa banyak negara di dunia yang telah berhasil mengendalikan jumlah kenaikan kasus positif Covid-19, namun Indonesia belum menjadi salah satu negara tersebut. Terkait dengan aspek ekonomi, sebelum Covid-19, ekonomi dunia sudah menghadapi persoalan tidak hanya *trade war* atau perang dagang namun juga perebutan sumber daya. Saat ini perang tidak bersifat fisik namun lebih fokus pada pembuatan strategi dalam menguasai sumber daya. Dampak Covid-19 ini membuat ekonomi Indonesia dan juga ekonomi global mengalami penurunan yang signifikan.

Selain itu, resesi juga melanda perekonomian dunia termasuk Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki tingkat resesi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, negara-negara Eropa,

dan Amerika Serikat, tidak dapat diartikan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Enny menjelaskan bahwa negara-negara yang awalnya memiliki tingkat resesi lebih tinggi dari Indonesia, saat ini sudah mulai menunjukkan perubahan ke arah kurva V atau kurva U pada triwulan tiga yang berarti bahwa perekonomian mereka mulai *recovery* dan ada kepastian pulih. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka dapat mengendalikan jumlah kenaikan kasus positif Covid-19. Jika Indonesia tidak dapat mengendalikan kurva Covid-19, maka ekonomi dikhawatirkan tidak berjalan menuju ke arah kurva V atau kurva U namun ke arah kurva W di triwulan tiga. Hal tersebut menyebabkan keengganan investor untuk berinvestasi ke Indonesia. “Ekonomi akan kembali normal, aktifitas akan kembali normal, jika Covid-19 sudah hilang,” jelas Enny.

Terkait dengan dampak Covid-19 terhadap ketahanan gatra ekonomi Indonesia, Enny menyatakan bahwa ketahanan gatra ekonomi Indonesia dapat diukur melalui lima aspek yaitu kemakmuran, keadilan, keamanan, kemandirian, dan daya saing dengan masing-masing indikatornya. Pada indikator daya beli masyarakat di dalam aspek kemakmuran, Enny menyatakan bahwa Indonesia mengalami deflasi secara persisten dalam tiga bulan berturut-turut hingga bulan September 2020 lalu yang menandakan bahwa inflasi disebabkan oleh adanya penurunan harga dari sisi suplai yang disebabkan oleh supply yang meningkat atau terjadi efisiensi yang menyebabkan penurunan harga. Sehingga, jika jumlah pasokan atau penawaran meningkat atau harga produksi turun maka terjadi tingkat penurunan harga secara umum. Enny menuturkan bahwa pada saat pandemi seperti ini, hal tersebut mustahil terjadi. Maka dapat diartikan bahwa angka deflasi selama tiga bulan berturut-turut dikarenakan adanya persoalan pada sisi demand atau permintaan masyarakat yang tergerus.

Hal tersebut diperlihatkan pula oleh data-data penjualan retail yang masih minus hingga bulan Agustus yang masih berada pada kisaran 10 persen. Keadaan tersebut juga berdampak kepada ekonomi. Penjualan retail Indonesia pada kondisi normal, jelas Enny, dapat menyentuh *double digits*. Jika keadaan saat ini menyentuh minus 10 persen, maka dapat diartikan penjualan retail mengalami penurunan hingga hampir 20 persen. Enny menyatakan bahwa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang sejak awal pandemi Covid-19 memberlakukan pembatasan sosial yang ketat dan mengalami resesi yang tinggi, saat ini sudah dapat menata kembali perekonomiannya dikarenakan mereka telah berhasil menekan angka pertumbuhan kasus Covid-19. Tingkat kepercayaan konsumen pun meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun Indonesia memiliki tingkat resesi yang rendah tidak berarti bahwa ketahanan ekonomi Indonesia kuat.

Di akhir paparannya Enny menyebutkan beberapa hal yang harus digarisbawahi yaitu selain daya beli masyarakat, investasi juga menjadi salah satu masalah. Persoalan investasi di Indonesia tidak disebabkan karena tidak adanya minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, namun karena kualitas investasi Indonesia yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional Indonesia yaitu nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja, namun investasi yang masuk saat ini secara justru didominasi oleh investor di bidang jasa. Enny menuturkan bahwa investasi saat ini meningkat namun penyerapan tenaga kerja justru menurun. Hal itu disebabkan oleh karena 30 persen dari investasi adalah sektor logistik yang berarti melayani kepentingan investor yaitu berdagang yang disebut Enny tidak berbeda dengan kepentingan VOC pada masa Kolonial Belanda di Indonesia. Investor yang masuk tidak hanya berkontribusi rendah terhadap kepentingan nasional Indonesia, namun juga menjadi

penggerus industri-industri dalam negeri.

Enny menegaskan bahwa investasi yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan seperti sektor manufaktur. Namun kelemahan sektor manufaktur adalah regulasi, efisiensi dan competitiveness. Jika bicara soal efisiensi dan competitiveness, jelas Enny, permasalahan utamanya adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. Sehingga Indonesia ingin berfokus pada penciptaan lapangan kerja sesuai dengan narasi Omnibus Law yang menurut Enny sudah tepat, maka pihak-pihak yang ingin membelokkan narasi tersebut harus di benahi di level legislatif atau eksekutif.

Enny menyimpulkan jika Indonesia ingin keluar dari permasalahan krusial dan fundamental di sektor ekonomi, harus fokus

pada tingkat survival masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini. Urusan survival masyarakat ini sangat terkait dengan pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Semua negara di dunia, jelas Enny, fokus pada pasokan pangan di negerinya karena menurunnya produktivitas dunia. Jika Indonesia yang memiliki kekuatan di sektor agraris mengabaikan momentum dan peluang itu, Indonesia akan kehilangan momentum. Selain itu, UMKM yang menjadi salah satu faktor pembuka lapangan kerja terhambat karena kesulitan mendapatkan akses seperti akses pemasaran dan akses bahan baku yang dikuasai oleh korporasi-korporasi besar juga harus menjadi fokus dalam menyelesaikan permasalahan krusial dan fundamental di sektor ekonomi.

“

**JGF sebagai forum intelektual bagi para akademisi, praktisi, dan pemimpin dunia dapat menjadi wadah bagi para ahli berbagi ide-ide mereka untuk menciptakan tatanan dunia yang aman, sejahtera, dan beradab.**



# Olah Sismennas, Simulasi Sinkronisasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor



Foto: humas-lhn

**P**eserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61 melaksanakan simulasi peran penentu kebijakan pada 13 Kementerian/ Lembaga dalam rangkaian kegiatan Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas) pada Selasa (22/9), secara virtual.

Olah Sismennas merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh Lemhannas RI dalam proses belajar mengajar bagi para PPRA, yakni kegiatan latihan simulasi hubungan kerja sama, koordinasi, dan sinkronisasi antarlembaga dalam menghasilkan dan mengoperasionalkan suatu kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan

pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terselenggara secara sinergis, efektif, dan efisien serta membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Diharapkan para peserta usai melaksanakan Olah Sismennas, mampu membuat kebijakan, strategi, dan upaya dalam rangka memecahkan permasalahan nasional dengan mengaplikasikan seluruh bidang studi yang telah diberikan. Selain itu, peserta juga diharapkan mampu melakukan koordinasi secara lintas sektoral melalui prosedur dan mekanisme birokrasi guna mengambil keputusan yang diperlukan serta mampu mengambil keputusan dalam kondisi yang serba terbatas baik dari

aspek waktu/sarana prasarana yang tersedia.

Mengangkat tema “Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Terkait dalam rangka Menghadapi Pandemi Covid-19”, dalam skenario Olah Sismennas digambarkan dinamika kehidupan nasional yang diasumsikan, tetapi tetap logis. Situasi yang dimunculkan dibangun sedemikian rupa sehingga tercipta kesamaan cerita dengan keadaan sesungguhnya. Selain itu, dihadirkan juga dinamika yang mempengaruhi kehidupan nasional yang digambarkan oleh dinamika eksternal dan internal sehingga pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia menjadi lebih dinamis yang disesuaikan dengan skenario yang telah direncanakan.

Penyelenggaraan Olah Sismennas untuk peserta PPRA 61 kali ini sangat jauh berbeda dengan PPRA sebelumnya. Perbedaan tersebut terkait dengan metode Olah Sismennas yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka, tetapi kali ini dilaksanakan secara virtual dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pelaksanaan Olah Sismennas dengan metode virtual baru kali ini kita laksanakan, dan kita mengharap, jika metode ini berhasil, dapat menjadi model untuk dikembangkan pada kegiatan-kegiatan Olah Sismennas berikutnya.

# Ilmu Sosial dan Politik

# Mampu Menjangkau

## Akar Permasalahan Fenomena Manusia

ilmu-ilmu sosial dan politik yang merupakan ilmu yang mampu menembus “wilayah abu-abu” proses sebab akibat perilaku manusia yang menjangkau akar permasalahan fenomena manusia

---

**Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo**  
Gubernur Lemhannas RI

---

**Foto.**  
humas-lhn

---

**G**ubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi pembicara kunci dalam Webinar Nasional ke-4 Forum Komunikasi Dekan FISIP/Ketua STISIP PTS Se-Indonesia, pada Sabtu, (26/09). Diselenggarakan secara virtual, Webinar Nasional tersebut mengangkat tema “Ancaman Radikalisme, Intoleransi dan Komunisme Terhadap NKRI dari Perspektif Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik”.

“Persamaan atau benang merah yang kita dapatkan dari tiga aspek yang pada webinar hari ini, mendapatkan pokok bahasan, yaitu radikalisme, intoleransi, dan komunisme,” kata Agus. Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa intoleransi merupakan sebuah keadaan awal yang apabila tidak ditangani dengan baik maka akan menjurus kepada radikalisme dan komunisme. Sedangkan, radikalisme dan komunisme merupakan dua buah aliran atau ideologi yang bertujuan untuk menanamkan ideologinya atau sistemnya sendiri dengan menggantikan



tatanan yang sudah ada berdasarkan sebuah dorongan atau upaya yang mencerminkan kekerasan.

Bila dipandang dari perspektif ilmu sosial dan ilmu politik, maka ada beberapa faktor kemunculan fenomena radikalisme, intoleransi, dan komunisme. Faktor pertama adalah menyangkut kecenderungan perubahan hubungan sosial dalam lingkup kenegaraan yang di dalamnya terkandung elemen tatanan sosial yang terikat dalam sebuah sistem politik. Selanjutnya adalah gesekan-gesekan sosial yang diakibatkan perbedaan klaim kebenaran keyakinan individu terhadap pendirian nilai-nilai sosial tertentu, yang pada akhirnya membentuk sebuah pengelompokan yang didasarkan pada keyakinan yang mana satu sama lainnya saling berbeda dan saling bertentangan.

Kemudian tekanan sosial yang dimunculkan sebagai implikasi tekanan kepentingan tertentu yang menimbulkan pergerakan deviatif atau tindakan yang melenceng atau menjauh dari norma kesepakatan kolektif atau yang menolak

tertib sosial. Radikalisme juga menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada, dengan ciri-ciri berbentuk tindakan intoleransi atau tidak memiliki toleransi pada golongan yang memiliki pemahaman berbeda.

“Karena ilmu-ilmu sosial dan politik merupakan disiplin ilmu yang berpusat pada perilaku manusia, maka ilmu-ilmu sosial dan politik yang merupakan ilmu yang mampu menembus “wilayah abu-abu” proses sebab akibat perilaku manusia yang menjangkau akar permasalahan fenomena manusia,” ujar Agus. Selanjutnya Agus menyampaikan bahwa ilmu-ilmu sosial dan politik diharapkan mampu mengungkap aspek proses sebab akibat dalam analisis yang komprehensif untuk menemukan akar masalah dan akibat dari fenomena dalam bidang sosial dan politik serta mencapai temuan yang komprehensif dan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat.

Beberapa di antaranya adalah, pertama, mengantisipasi kemunculan potensi deviasi sosial, penyimpangan kesepakatan ideologi

dengan ketimpangan kepentingan politik. Kedua, terciptanya formula kontra-aksi yang komprehensif dan berimbang antara upaya meredam ekses politik yang ditimbulkan sebagai akibat gejolak sosial dengan yang dipengaruhi atau “ditunggangi” oleh kepentingan politik tertentu. Ketiga, terbangun kultur sosial dan kultur politik yang dikelola secara baik dalam wadah kepemimpinan dan kelembagaan politik yang mapan sehingga potensi pergerakan sosial yang menyimpang dari komitmen politik bersama akan dapat diredam. Keempat, tercipta paradigma berpikir holistik dan sistematis dalam membentuk kesinambungan dan sinkronisasi sistem sosial yang terintegrasi dengan sistem politik untuk membangun stabilitas politik dan tertib sosial.

“Melalui kegiatan webinar nasional ini, diharapkan dapat melahirkan beberapa ide dan pemikiran yang strategis, guna tercipta rekomendasi yang terbaik dalam upaya menjaga keutuhan NKRI,” ujar Agus menutup penjelasannya.



# Di Tengah Pandemi Covid-19, Lemhannas RI Tetap Selenggarakan P3DA 11



**L**emhannas RI kembali menyelenggarakan Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 11 Tahun 2020. P3DA 11 dilaksanakan selama dua bulan yang dimulai pada Senin, 28 September 2020 dan direncanakan ditutup pada Rabu, 9 Desember 2020. Adanya pandemi Covid-19 melatarbelakangi penyelenggaraan P3DA dilaksanakan secara virtual.

Penyelenggaraan P3DA diharapkan dapat mewujudkan pimpinan tingkat daerah yang bermoral, beretika dan berkarakter kebangsaan, memahami 4 Konsensus Dasar Bangsa meliputi Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan cakrawala pandang operasional yaitu, wawasan nusantara, ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional, terampil dalam memecahkan masalah di daerah, serta mampu

memberikan saran kepada pemerintah daerah tingkat I tentang kebijakan publik dan terkait nilai-nilai kebangsaan.

P3DA 11 diikuti sebanyak 26 peserta yang terdiri dari 9 orang bupati, 3 orang Wakil Bupati, 4 orang Walikota, 1 orang Wakil Walikota, 7 Ketua DPRD, 1 Wakil Ketua DPRD, dan 1 orang Sekretaris Daerah Kabupaten.

“Keberadaan para peserta di Lemhannas RI, diharapkan dapat memiliki tekad untuk melakukan revolusi mental transformasi sikap dan perilaku yang mencerminkan sosok pimpinan daerah dengan kualitas karakter kebangsaan yang kuat,” ujar Agus.

Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa para peserta perlu mempunyai kemampuan membuat analisis dan keputusan, berpikir strategis, serta memiliki martabat dan kejujuran yang merupakan prasyarat utama

karakter individu sebagai pimpinan tingkat daerah. Oleh karenanya, Agus menegaskan bahwa etika, moral dan kejujuran harus menjadi pijakan utama bagi para peserta dan para peserta harus menjaga nama baik daerah tempat asal peserta mengabdikan dan bertugas.

Kemudian Agus menyampaikan bahwa kemenangan kontestasi kekuasaan politik konstitusional untuk jabatan publik apa pun merupakan prestasi yang bisa dicapai oleh seorang politisi dalam demokrasi seperti yang para peserta P3DA 11 capai. Cara pemilihan dengan pemilihan langsung oleh rakyat menambahkan kredibilitas proses pemilihan para peserta di dalam jabatan masing-masing.

Menurut Agus, jabatan dan kekuasaan tidak pernah menjadi tujuan akhir seorang politisi yang memiliki modal dasar dan wawasan moral kebangsaan. “Apa yang dapat diabdikan dalam jabatan, apa peran yang dimainkan dalam jabatan tersebut bagi masyarakat, bangsa, dan negara akan selalu menjadi kriteria akhir tentang bagaimana kita menilai seorang pemimpin dalam kapasitas jabatan publik,” tutur Agus.

Menutup sambutannya, Agus menyampaikan bahwa Lemhannas RI tidak mengajar atau memberi kuliah pada para peserta. Namun, para peserta berada di Lemhannas RI untuk menyamakan paradigma wawasan kebangsaan dan untuk membulatkan pencapaian proses demokratis yang telah para peserta capai. “Lemhannas RI ada untuk membantu peserta sekalian untuk meningkatkan kualitas dharma bakti para peserta dalam kapasitas sebagai pejabat publik,” kata Agus.

Walaupun diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, Lemhannas RI berupaya seoptimal mungkin untuk mempersiapkan dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik tanpa mengurangi kualitas pendidikan yang diberikan dan akan memperhatikan protokol kesehatan selama proses pendidikan berlangsung.

# 90 Istri dan 6 Suami Peserta PPRA 61 Ikuti Penataran

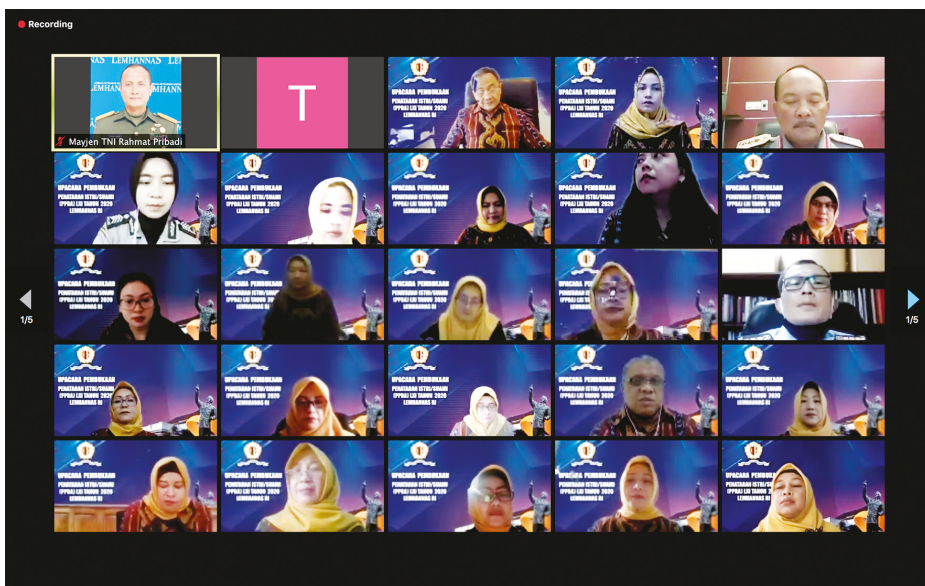
penyelenggaraan penataran secara jarak jauh tanpa mengurangi kualitas belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai bahwa keberhasilan para peserta Lemhannas RI dalam meniti karier dan mengemban tugas negara, tidak mungkin terwujud tanpa adanya peran istri/suami selaku pendamping, oleh sebab itu sudah sepatutnya keharmonisan suami/istri terus dijaga melalui pemeliharaan dan penyesuaian wawasan, moral dan etika.

Semangat kebangsaan, iklim kekeluargaan yang penuh toleransi, dan kebersamaan dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika, sambung Agus, dapat mengalami erosi akibat arus globalisasi dan dinamika situasi politik yang berkembang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dengan lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi oleh akar kerakyatan perlu semakin dikukuhkan.

Seiring dengan hal tersebut, maka hakikat penataran tersebut adalah menyiapkan para istri/suami, agar lebih memantapkan peranan dalam membantu dan mendampingi suami/istri, baik dalam hubungan kedinasan maupun dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. "Melalui penataran ini hendaknya dapat dipahami makna moral dan etika kebangsaan, yang selanjutnya dapat diimplementasikan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam kehidupan sehari-hari," ujar Agus.

Agus berharap agar seluruh peserta dapat memanfaatkan penataran tersebut dengan sebaik-baiknya karena penataran tersebut merupakan upaya memantapkan peran peserta penataran dalam organisasi, keluarga maupun di lingkungan masyarakat.



Jelang berakhirnya Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Lemhannas RI menyelenggarakan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 61 yang dibuka pada Senin (5/10) dan berlangsung selama lima hari secara dalam jaringan.

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Rahmat Pribadi, menyampaikan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 96 peserta yang terdiri dari 90 istri dan 6 suami tersebut diselenggarakan mulai 5 Oktober 2020 hingga 9 Oktober 2020.

Penataran bagi istri/suami

peserta PPRA 61 bertujuan untuk membekali dan memantapkan para istri/suami dalam peranannya sebagai pendamping kader pimpinan tingkat nasional, meningkatkan wawasan tentang etika bagi istri/suami yang dapat menjadi teladan bagi keluarga besar unit kerja dan masyarakat, serta meningkatkan keakraban, persaudaraan, dan kekeluargaan antar sesama pendamping peserta PPRA 61 dan dengan Lemhannas RI.

Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 61 yang dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19, memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaannya, terutama para peserta harus dapat menyesuaikan

# Wakil Presiden RI

## Harapkan Alumni PPRA 60 dan Peserta PPRA 61 Mampu Memainkan Peran Strategis dan Responsif

Pengembangan SDM yang unggul menuju era teknologi dan informasi adalah prioritas. SDM Indonesia harus disiapkan untuk mampu bersaing, cepat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi

**K. H. Ma'ruf Amin**  
Wakil Presiden RI

**Foto.**  
humas-lhn

**S**aya sampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta PPRA 60 dan PPRA 61 yang telah berhasil menyelesaikan program pendidikan ini dalam suasana pandemi, namun tetap menjunjung tinggi profesionalisme, semangat kerja, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” kata Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin saat memberikan pembekalan kepada alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 dan peserta PPRA 61, pada Selasa (13/10) secara virtual.

K. H. Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa selama lebih dari enam bulan, mayoritas negara-negara di dunia dilanda pandemi Covid-19 yang membuat tatanan hidup dan berbagai sektor kehidupan masyarakat mengalami disrupsi dan perubahan yang signifikan. Hal tersebut mengubah kebiasaan hidup lama, cara pandang dan sikap tindak.

Namun, K. H. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa bangsa Indonesia mewarisi semangat juang yang tinggi untuk menghadapi dan mengatasi tantangan akibat dampak pandemi Covid-19. “Optimisme tersebut harus terus kita jaga dan kita gaungkan melalui upaya nyata dan terus kreatif dan inovatif agar masyarakat dan bangsa kita



mampu segera pulih dan kembali produktif guna mencapai cita-cita Indonesia maju,” ujar K. H. Ma’ruf Amin.

Lebih lanjut K. H. Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa beban perekonomian yang ditimbulkan pandemi Covid-19 dirasakan sangat berat oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, pemerintah terus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat tahun 2020 tidak kembali negatif, sehingga keseluruhan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tidak mengalami kontraksi yang terlalu dalam.

“Hal terpenting dalam penanggulangan dampak pandemi saat ini adalah bagaimana menangani aspek kesehatan, menjaga tingkat konsumtif masyarakat, dan memulihkan sektor ekonomi serta menggerakkan kembali dunia usaha,” tutur K. H. Ma’ruf Amin.

Dalam mewujudkan hal tersebut, K. H. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah secara konsisten melakukan serangkaian kebijakan dalam rangka penanganan dampak

pandemi, yakni *re-focusing* dan realokasi anggaran dilakukan untuk penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat termasuk tenaga medis, memastikan perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, serta memberikan berbagai dukungan serta insentif bagi UMKM dan dunia usaha.

“Saya menyampaikan apresiasi atas 2 tema seminar yang diangkat PPRa 60 dan PPRa 61,” kata K. H. Ma’ruf Amin. Alumni PPRa 60 mengadakan seminar dengan mengangkat tema “Nasionalisme di tengah Pandemic Covid-19 dalam Menyongsong Indonesia Emas”. Sedangkan peserta PPRa 61 mengadakan seminar nasional dengan tema “Revitalisasi BUMN untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Menurut K. H. Ma’ruf Amin, nasionalisme dan kesejahteraan rakyat merupakan esensi dari tujuan berbangsa dan bernegara yaitu terciptanya bangsa Indonesia yang bersatu, cerdas, sejahtera, maju, mandiri, adil, dan makmur. Lebih

lanjut K. H. Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa dalam rangka menyongsong Indonesia emas, maka modal utama yang dibutuhkan adalah SDM yang unggul dan berkualitas serta perbaikan struktur perekonomian atau transformasi ekonomi.

“Bapak Presiden juga telah mengamanatkan bahwa pengembangan SDM yang unggul menuju era teknologi dan informasi adalah prioritas. SDM Indonesia harus disiapkan untuk mampu bersaing, cepat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi,” ujar K. H. Ma’ruf Amin. Adanya pandemi Covid-19 yang telah mengubah berbagai aktivitas yang semula dapat dilakukan secara tatap muka dan manual, berubah menjadi harus dilakukan secara digital. Hal tersebut kemudian menjadi pendorong dan pemacu yang menyadarkan pentingnya penguasaan teknologi informasi ke depannya.

K. H. Ma’ruf Amin juga menjelaskan bahwa meskipun perekonomian mengalami perubahan akibat pandemi, namun pemerintah

tetap terus berusaha dan berupaya memperbaiki struktur perekonomian dalam rangka pemulihan ekonomi sekaligus mengejar visi menjadi negara maju di 2045. Upaya perbaikan struktur ekonomi juga tetap dilakukan pada masa pandemi termasuk dengan merevitalisasi BUMN melalui integrasi, konsolidasi, dan *streamlining* kegiatan guna meningkatkan efisiensi daya saing dan provitabilitas. “Dalam pemulihan ekonomi nasional peran BUMN sangat penting, BUMN diharapkan dapat menjadi motor penggerak dan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, serta memberikan layanan publik yang semakin berkualitas guna mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia emas,” tutur K. H. Ma’ruf Amin.

“Saya berharap bahwa selama masa pendidikan di Lemhannas RI,

Saudara–Saudara mendapatkan tambahan pengalaman, pengetahuan, serta kedalaman dalam melakukan analisis keadaan, menyusun rekomendasi, maupun pengambilan kebijakan dan keputusan,” kata K. H. Ma’ruf Amin. Lebih lanjut K. H. Ma’ruf Amin berharap berbagai diskusi dan kajian–kajian sesuai tema seminar nasional di atas, dapat diaktualisasikan dalam bentuk program nyata yang mampu mengangkat optimisme dan memperkuat komitmen kebangsaan melalui penyajian alternatif–alternatif solusi yang direkomendasikan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Alumni PPRA 60 dan peserta PPRA 61 nantinya diharapkan menjadi pemimpin yang mampu memainkan peran strategis dan responsif terhadap berbagai tantangan yang dinamis, inovatif, dan kreatif dari

kepemimpinan yang unggul yang sangat diperlukan untuk membawa perubahan kepada cara hidup baru yang sehat dengan produktivitas yang tinggi.

K. H. Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa alumni PPRA 60 dan peserta PPRA 61 juga diharapkan mampu menjadi pemimpin yang berani mengambil keputusan, inovatif, kerja kolaboratif dan mampu membawa Indonesia lebih unggul secara komparatif maupun kompetitif. Hal inilah yang menjadi ciri dari SDM unggul kelas dunia yang berdaya saing. “Saya berharap seluruh alumni PPRA 60 dan peserta PPRA 61 dapat mengaktualisasikan berbagai pengetahuan dan keahlian yang diperoleh selama mengikuti pendidikan ini,” kata K. H. Ma’ruf Amin.



# Agus Widjojo: IKAL Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Lemhannas RI

IKAL sebagai sebuah organisasi besar perlu terus didorong untuk semakin dewasa dan mandiri. Oleh karena itu, hubungan dengan Lemhannas RI tidak perlu diikat dalam hubungan formal organisasi.

---

**Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo**

Gubernur Lemhannas RI

---

**Foto.**

humas-lhn

---

**G**ubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo selaku ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKAL masa bakti 2020–2025, Kamis (15/10).

Musyawarah Nasional ke-IV IKAL yang diadakan Agustus lalu telah menghasilkan DPP IKAL masa bakti 2020–2025 dengan susunan Ketua Umum Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Wakil Ketua Umum I Dr. Ir. Mustafa Abubakar, M.Si, Wakil Ketua Umum II Komjen Pol. (Purn.) Drs. Togar M Sianipar, M.Si., Sekretaris Jenderal Marsdya TNI (Purn.) Daryatmo, S.I.P, Bendahara Umum Dadan Irawan Sarpingi, B.A., MIBA, Koordinator Bidang Organisasi dan Taplai Dr. dr. Ulla Nuchrawaty, M.M., Koordinator Bidang Advokasi dan Hubungan Mayjen TNI (Purn) Djasri Marin, M.Sc., Koordinator Bidang Usaha dan Kekeluargaan Mayjen TNI (Purn) Dr. Bimo Prakoso, M.P.A, M.A., dan Koordinator Bidang Telematika dan Humas Dr. Rosarita Niken Widyastuti, M.Si.



“Di tengah pasang surut dan dinamika kehidupan nasional, IKAL selama ini senantiasa menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam memberikan berbagai sumbangsuhnya,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Terlebih lagi, pada masa pandemi Covid-19, IKAL telah menunjukkan kepeduliannya dalam mendukung penanggulangan virus Covid-19. Dengan capaian ikal tersebut, Agus meyakini bahwa IKAL Lemhannas RI ke depannya akan semakin berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

IKAL saat ini tidak hanya terpusat, tetapi memiliki komisariat provinsi yang memudahkan dalam konsolidasikan dengan para anggota IKAL yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Agus berharap bahwa ke depannya, IKAL harus semakin tumbuh dan berkembang sebagai tempat bersandar bagi seluruh komponen bangsa yang mendambakan Indonesia yang bersatu, maju dan sejahtera. Agus juga menyampaikan bahwa Lemhannas

RI dan IKAL bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. “IKAL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lemhannas RI,” ungkap Agus.

Pada kesempatan tersebut Agus juga menegaskan bahwa kehadiran alumni Lemhannas RI yang tersebar di daerah, perlu diberdayakan dan dimanfaatkan dalam menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam berbagai aktivitas seperti yang termuat dalam misi IKAL. Dalam misi yang lain, anggota IKAL juga harus membangun dan meningkatkan kebersamaan dalam ikatan kekeluargaan serta mempererat tali silaturahmi sesama alumni dalam rangka memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara serta mengembangkan potensi dan pemikiran para alumni dalam memecahkan masalah bangsa serta memberikan solusi yang tepat untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Agus, komisariat provinsi IKAL yang tersebar di 30 provinsi yang menjadi instrumen penguat dalam mendorong dan meningkatkan kapasitas dan peran IKAL secara

nasional. Oleh karena itu, seluruh komisariat provinsi tersebut harus dapat memperkuat komitmen dan pengabdian para alumni Lemhannas RI kepada bangsa dan negara dengan mengembangkan potensi dan pemikiran para alumni dalam memecahkan permasalahan bangsa sekaligus memberikan solusi yang tepat dan sekaligus menjadi katalisator dalam menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan.

Namun, di sisi lain Agus juga mengingatkan untuk tidak menutup mata terhadap kepentingan penyempurnaan tata kelola IKAL untuk memenuhi harapan agar IKAL menjadi organisasi model dalam tata laksana organisasi dan tugas pokok fungsi IKAL. Kemudian Agus mengingatkan bahwa IKAL sebagai sebuah organisasi besar perlu terus didorong untuk semakin dewasa dan mandiri. Oleh karena itu, hubungan dengan Lemhannas RI tidak perlu diikat dalam hubungan formal organisasi. Dengan demikian IKAL dapat lebih fleksibel dan bebas bergerak, tetapi tetap menjaga kehormatan dan marwah Lemhannas RI sebagai almamater.

# Transformasi Ekonomi Merupakan Kunci Indonesia Keluar dari *Middle Income Trap*

Demokrasi yang dijalankan tidak lagi prosedural, tapi berubah menjadi demokrasi substantif yang mendukung reformasi kelembagaan dan birokrasi yang lebih baik.

---

**Dr.(H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa**  
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

---

**Ilustrasi.**  
Google.com

---

**M**enteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa memberikan pembekalan kepada peserta Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 11 pada Jumat (16/10) secara virtual.

Suharso menjelaskan bahwa pada tahun 1980-an Indonesia sudah masuk negara dengan klasifikasi *middle income*, sementara China belum masuk dalam klasifikasi tersebut. Namun, pada tahun 1990-an China berhasil menyusul Indonesia. Setelah bertahun-tahun menjadi negara dengan klasifikasi *middle income*, pada tahun 2020 *Gross National Income* (GNI) per kapita Indonesia berhasil menembus angka di atas 4.000 Dolar AS dan menjadi negara dengan klasifikasi *upper middle income*.

Suharso menilai bahwa jika tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam waktu 14 tahun ke depan dapat terjaga dengan rata-rata 6%, maka kita akan keluar dari *middle income trap* pada tahun 2036 dan kemudian menjadi negara *high economy*.



“Kuncinya adalah transformasi ekonomi,” ujar Suharso. Lebih lanjut Suharso menjelaskan bahwa dalam mencapai hal tersebut, pemerintah berusaha untuk mencapai manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai iptek, serta menciptakan ekonomi maju dan berkelanjutan, pembangunan merata dan inklusif, negara demokratis, kuat, dan bersih.

Dalam kesempatan tersebut, Suharso menyampaikan pilar pembangunan Indonesia 2045 yang dirancang oleh pemerintah, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pemerataan pembangunan, dan pematapan

ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dalam pembangunan manusia dan penguasaan iptek, Suharso menegaskan bahwa kualitas pendidikan harus diperbaiki sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada pemerataan pembangunan, Suharso menyatakan bahwa pembangunan tidak bisa bersifat eksklusif. Infrastruktur di semua daerah harus diusahakan secara merata. Pemerintah juga memiliki komitmen terhadap penguasaan kekayaan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Terakhir dalam ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan, demokrasi akan

bergeser. Demokrasi yang dijalankan tidak lagi prosedural, tapi berubah menjadi demokrasi substantif yang mendukung reformasi kelembagaan dan birokrasi yang lebih baik.

Dalam hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan peraturan perundang-undangan, berperan menjadi *clearing house* dari seluruh perencanaan Indonesia yang mensinergikan dan mengkoreksikan semua perencanaan dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota. Peran tersebut diperlukan sehingga ada pengikat kegiatan-kegiatan yang dengan sendirinya akan mengikat semua perencanaan sampai di tingkat daerah.



# Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional melalui UMKM

akibat pandemi COVID-19 sebanyak 50% UMKM menutup usaha, sebanyak 88% usaha mikro tidak memiliki kas atau tabungan atau kehabisan pembiayaan keuangan, dan sekitar 60% usaha mikro mengurangi tenaga kerja.

---

**Drs. Teten Masduki**  
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

---

**Ilustrasi.**  
Google.com

---

**K**alau kita lihat pelaku usaha di Indonesia 99% itu UMKM,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Drs. Teten Masduki saat memberikan ceramah kepada Peserta Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 11 pada Kamis (12/11), secara virtual.

Teten menyampaikan bahwa total kontribusi Produk Domestik Bruto dari UMKM mencapai 57% dengan Kontribusi Tenaga Kerja yang diserap mencapai 97%. Jika dilihat dari angka-angka tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, yang pertama harus dipulihkan adalah UMKM. Hal tersebut dikarenakan pemulihan UMKM akan berdampak langsung kepada 97% tenaga kerja kita diserap di UMKM, setidaknya dapat mengurangi angka pengangguran dan sebagai upaya agar angka kemiskinan tidak terlalu tajam. “Paling tidak kalau kita bisa memulihkan UMKM, UMKM bisa menjadi penyangga ekonomi nasional,” ujar Teten.



Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM di Indonesia sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dalam pemulihan ekonomi nasional, UMKM mendapatkan prioritas. “Dampak Covid-19 terhadap UMKM memang cukup dalam,” tutur Teten.

Hasil survei yang dihimpun Kemenkop UKM menunjukkan data bahwa akibat pandemi COVID-19 sebanyak 50% UMKM menutup usaha, sebanyak 88% usaha mikro tidak memiliki kas atau tabungan atau kehabisan pembiayaan keuangan, dan sekitar 60% usaha mikro mengurangi tenaga kerja. Berdasarkan data tersebut, Teten menegaskan bahwa yang saat ini dihadapi memang sangat berat. Sejalan dengan hal tersebut, survei yang dilakukan langsung oleh Kemenkop dan UKM juga menunjukkan terjadinya gangguan

omzet penjualan, gangguan produksi, gangguan bahan baku, dan gangguan akses pembiayaan.

Survei yang dilakukan pada sekitar 235.000 pelaku usaha tersebut juga menunjukkan bahwa 90% UMKM membutuhkan pembiayaan untuk memulai usaha baru, 91,8% responden memilih kebijakan yang paling diharapkan adalah pinjaman tanpa bunga dan agunan, dan 89,5% responden mengharapakan bantuan tunai langsung atau hibah. Survei tersebut juga menunjukkan program pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM sudah relatif sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha kecil dan menengah.

Selanjutnya Teten menjelaskan bahwa Kemenkop UKM memiliki 2 program besar untuk memulihkan UMKM. Pertama adalah restrukturisasi atau relaksasi pinjaman selama

6 bulan dan fungsi di bunga 6% untuk UMKM yang dinilai *bankable*. Sedangkan untuk UMKM yang masih *unbankable* diberikan bantuan lewat hibah modal kerja lewat Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro sejumlah Rp2.400.000 per pelaku usaha mikro.

Selain memberikan bantuan pada sisi pendanaan, Kemenkop juga membantu dari sisi permintaan dengan beberapa program seperti Pelibatan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Pasar Digital UMKM, Pengembangan Koperasi Pangan, Belanja di Warung Tetangga, serta mengadakan Pendampingan dan Pelatihan. Pemerintah juga mengalokasikan dana sebanyak Rp321 Triliun yang diprioritaskan untuk belanja produk UMKM.

# Agus Widjojo: Janganlah Bekerja Bertujuan Untuk Jadi **Pahlawan,** Bekerjalah Dengan **Sepenuh Hati**

pahlawan di masa lalu dan di masa depan akan memiliki konteks yang berbeda seiring dengan berubahnya prasyarat yang mengikuti zaman.

---

**Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo**  
Gubernur Lemhannas RI

---

**Foto.**  
humas-lhn

---

**T**idak ada pahlawan yang direncanakan,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat membuka Webinar Refleksi Hari Pahlawan yang diselenggarakan oleh Alumni Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) Angkatan II Tahun 2020, pada Jumat (13/11) secara virtual.

Pada kesempatan tersebut Agus menyampaikan bahwa gelar pahlawan diberikan setelah darmabakti konkret seseorang yang melebihi panggilan tugas dan menunjukkan karakter yang kuat untuk tujuan kepentingan umum. “Pahlawan adalah manusia yang memiliki tujuan yang dijaga secara konsisten dalam karakter yang membangun energi positif di dalam kehidupan bersama,” tutur Agus.

Pahlawan di masa lalu dan di masa kini dirasa sudah sangat berbeda. Perjuangan pahlawan di masa lalu lebih fokus pada aspek fisik, karena saat itu memang merupakan kebutuhan untuk berjuang secara fisik. Dalam konteks era global, peluang untuk menjadi pahlawan terbuka bagi siapa pun dengan bercermin dan mengambil pelajaran serta inti sari dari sikap kepahlawanan yang sudah ditunjukkan oleh para pahlawan bangsa dengan membuktikan mampu menjadikan negara Indonesia merdeka dan membentuk negara berdasarkan Pancasila.

Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan bahwa semangat memperingati hari kemerdekaan di masa kini memberikan dua fokus orientasi, yakni ke masa lalu dan ke masa depan. Ke masa lalu dapat mempelajari hal-hal yang dapat diambil dari teladan yang diberikan oleh para pahlawan yang telah berjuang. Selanjutnya, ke masa depan

harus menyadari bahwa peluang untuk menjadi pahlawan selalu terbuka bagi siapa pun dalam konteks apa pun dan tidak harus dalam bentuk secara klasikal seperti pahlawan-pahlawan di masa lalu.

Agus menegaskan bahwa menjadi pahlawan di masa lalu dan di masa depan akan memiliki konteks yang berbeda seiring dengan berubahnya prasyarat yang mengikuti zaman. Menjadi pahlawan adalah melaksanakan darmabakti dengan melebihi panggilan tugas, yakni tugas di masa lalu yang adalah merebut kemerdekaan, dan berbeda dengan tugas masa kini, yaitu menjadi pemenang di era globalisasi. Sebuah bangsa dapat menjadi pemenang dalam era globalisasi ketika berhasil membangun daya saing. Upaya membangun daya saing tersebut harus diawali dengan evaluasi mengenai kekurangan dan sisi lemah yang harus diperbaiki serta membina sisi kuat yang dimiliki agar lebih

efektif sehingga dapat digunakan juga untuk membangun kerja sama dan perdamaian antarbangsa di dunia.

Dengan demikian era globalisasi membuka peluang bagi setiap warga untuk dapat memberikan darmabakti yang efektif bagi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam era ini. Bahkan hal tersebut dapat menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga valid untuk dijadikan dasar bagi pembangunan masyarakat global yang terdiri dari elemen-elemen antarbangsa dengan karakteristik kebhinnekaan.

Tidak lupa Agus juga menyampaikan bahwa gelar pahlawan akan diberikan oleh publik dan oleh sejarah kepada yang pantas menyandangnya. "Janganlah bekerja bertujuan untuk jadi pahlawan, bekerjalah dengan sepenuh hati, sebaik-baiknya untuk memberikan darmabakti dengan memenuhi panggilan tugas," kata Agus.



# Penguatan Kapasitas Personel Lemhannas RI Dalam Memasuki Era Industri 4.0

Yang diharapkan adalah peserta dari materi ini dapat diserap individu dan mampu diterapkan di unit kerja pada Lemhannas RI. Jadi saya tidak ingin melihat pada aspek strategis dan global, tapi ada pada perubahan individu di Lemhannas RI

---

**Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo**  
Gubernur Lemhannas RI

---

**Foto.**  
humas-lhn

---

**K**egiatan ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kapasitas personel sebagai pendorong transformasi yang mendukung Indonesia melakukan lompatan proses pencapaian aspirasi *Roadmap/Peta Jalan Program Making Indonesia 4.0* dan pembangunan berkelanjutan melalui tindakan kolaboratif dan solusi inovatif,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Personel Lemhannas RI dalam Memasuki Era Industri 4.0 pada Senin (23/11).

Penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan metode secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan dan secara virtual tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan personel Lemhannas RI dalam memahami proses *Theory U* sebagai sebuah kerangka dalam merancang dan memberikan proses transformasi yang inovatif baik di tingkat individu dan kolektif (organisasi) dengan capaian *Head Intelligence*, *Hands Intelligence*, dan *Heart Intelligence*.



Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran kegiatan ini meliputi penguatan kecerdasan berpikir secara komprehensif, holistik dan integral dalam proses pembelajaran memasuki Era Industri 4.0; penguatan keahlian teknis, yang mampu menawarkan inovasi penciptaan sistem dan laboratorium pembelajaran yang bersifat lintas sektoral memasuki Era Industri 4.0; dan penguatan kecerdasan emosional dalam mentransformasikan berbagi pengalaman dan alat pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran dalam proses pembelajaran memasuki Era Industri 4.0.

Agus menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan sarana untuk mengembangkan kapasitas personel Lemhannas RI. "Terkait dengan tranformasi untuk mendorong

perubahan, jadi kita harus akrab dengan perubahan. Kebanyakan dari kita itu masih mencari-cari posisi yang nyaman dengan perubahan," kata Agus.

Kemudian Agus menyampaikan bahwa dalam melakukan lompatan aspirasi *roadmap*/peta jalan diperlukan tindakan kolaboratif. "Jadi kita sudah meninggalkan tindakan yang sifatnya individual dan sektoral. Kita mengutamakan pada tindakan kolaboratif, dan dapat bersama-sama kita cari lagi maknanya apa melalui pelatihan ini," kata Agus.

Agus berharap para peserta akan mendapatkan sesuatu yang mampu diterapkan pada unit kerja masing-masing di Lemhannas RI. "Justru yang diharapkan adalah peserta dari materi ini dapat diserap individu dan mampu diterapkan di unit kerja

pada Lemhannas RI. Jadi saya tidak ingin melihat pada aspek strategis dan global, tapi ada pada perubahan individu di Lemhannas RI," ujar Agus.

Kegiatan yang diikuti oleh 100 peserta (tiga orang eselon I, 17 orang eselon II, 29 orang eselon III, 52 orang eselon IV, dan 1 orang staf) tersebut, diselenggarakan dalam dua gelombang, yakni gelombang pertama pada 23 November sampai 9 Desember 2020 dan gelombang kedua pada 30 November sampai 11 Desember 2020. Selain diisi oleh fasilitator dari Lemhannas RI dan United in Diversity (UID), pelatihan tersebut juga akan diisi oleh Rerie Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI, Suryopratomo Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Tantowi Yahya Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, serta Dr. Suyoto mantan Bupati Bojonegoro.

# Jangan Membenarkan Yang Biasa, Tapi Membiasakan Yang Benar

**R**ahmat Pribadi lahir di Jakarta sekitar 57 tahun silam. Rahmat menghabiskan masa kecil hingga remaja di daerah Cijantung yang juga merupakan kawasan militer. "Jadi Cijantung itu suatu kawasan militer, ada Kopasus, ada Kostrad, ada Kavaleri dan sebagainya, termasuk tempat sekolah saya disana yaitu SMA 39 Cijantung," ucap Rahmat.

Rahmat yang berasal dari keluarga PNS sederhana, mengaku bahwa lingkungan tempat tinggalnya lah yang membuat Rahmat ingin menjadi seorang tentara. "Karena keseharian saya melihat prajurit berlatih, upacara dan sebagainya sehingga memotivasi saya untuk ikut mendaftar di akademi militer sebagai prajurit TNI," kenang Rahmat.



Mayjen TNI Rahmat Pribadi  
Foto.humas-lhn



“Alhamdulillah saya diterima dan mendapat kesempatan. Jadi saya masuk tahun 1981 dan lulus tahun 1985. Jadi saya lulusan Akademi Militer tahun 1985,” sambung Rahmat.

Memulai masa dinasnya menjadi seorang Prajurit TNI AD, Rahmat masuk ke dalam Korps Infanteri yang merupakan satuan terbesar di Angkatan Darat. Inilah salah satu hal yang membuatnya selalu berpindah-pindah tempat dinas.

Sepanjang kedinasannya, Rahmat mengaku telah 25 kali pindah kedinasan. “Saya pernah di Kodam Aceh, saya pernah juga di Sumatera Utara. Untuk Kodam di Pulau Jawa saya pernah dinas di Kodam Siliwangi, Kodam Diponegoro, dan Kodam Brawijaya,” tutur Rahmat.

Sambung Rahmat, ia pernah juga bertugas di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dimana ia mendapatkan pangkat Jenderal Bintang Satu (Brigadir Jenderal TNI). “Inilah pengalaman hidup saya, dimana berpindah-pindah kedinasan yang hampir setiap dua tahun sekali selalu berpindah. Yang paling lama adalah di Lemhannas RI sudah hampir tiga tahun berdinan,” jelas Rahmat.

“Bagi saya, ya Lemhannas RI ini, akhir dari puncak karir saya berdinan. Alhamdulillah disini saya menjabat Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional. Jadi Berpindah-pindah tempat itu ternyata indah,” sambung Rahmat.

Rahmat sendiri mengaku dengan pengalaman berdinan yang selalu berpindah-pindah hingga 25 kali membuat dirinya lebih mengenal Indonesia yang dinilainya Indonesia itu memiliki wilayah yang luas, kaya akan sumber daya alamnya dan budaya yang beragam.

Menyenggang budaya, Rahmat sangat terkesan dengan para anggota



prajurit TNI dibawahnya yang sebagian besar merupakan suku setempat. Baginya semua suku dan budaya yang ia temui ramah-ramah dan menarik. “Ada budayanya yang keras tapi setia, ada yang menarik, baik dan ramah, dan berbagai karakter lainnya yang pernah saya temui secara langsung di setiap wilayah kedinasan,” terang Rahmat.

Rahmat melihat masyarakat perbatasan masih sedikit sehingga menurutnya program transmigrasi wilayah perbatasan perlu diadakan karena potensi kekayaan alam di wilayah perbatasan cukup melimpah.

Menurutnya, saat ini infrastruktur di perbatasan sudah cukup baik dibandingkan ketika Rahmat bertugas menjadi Komandan Kodim 1204 Sanggau. “Dulu kehidupan masyarakat masih bergantung kepada negara tetangga, namun saat ini akses ke wilayah perbatasan sudah ada sehingga perekonomian di wilayah perbatasan semakin membaik,” ujar Pria yang memiliki hobi berkebun.

“

**Bagi saya, ya Lemhannas RI ini, akhir dari puncak karir saya berdinan. Alhamdulillah disini saya menjabat Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional. Jadi Berpindah-pindah tempat itu ternyata indah**

Selain di wilayah perbatasan Rahmat ketika berpangkat Letnan Dua, pernah bertugas di wilayah operasi seperti di Timor-Timur tahun 1987 hingga 1988. Dan pada tahun 1998 saat berpangkat Mayor, Rahmat



**Rahmat melihat masyarakat perbatasan masih sedikit sehingga menurutnya program transmigrasi wilayah perbatasan perlu diadakan karena potensi kekayaan alam di wilayah perbatasan cukup melimpah.**

kembali bertugas di Timor-Timur. Selain itu juga Rahmat juga sempat ditugaskan di wilayah operasi lainnya seperti di Aceh pada tahun 1996 ketika berpangkat Kapten.

Rahmat yang pernah menjabat sebagai Kasdam V/Brawijaya pada tahun 2016, juga memiliki pengalaman tugas ke luar negeri baik dalam rangka kunjungan dan penugasan seperti ke Malaysia, Yordania, Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Rahmat yang gemar membaca memiliki prinsip hidup “Jangan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar”. Baginya hal tersebut penting dalam menjalani karirnya sebagai prajurit TNI AD dan seorang Suami dan Ayah dari tiga orang anak.

Kini sebagai seorang Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional di Lemhannas RI, Rahmat yang merupakan Alumnus Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 50 pada tahun 2013, menilai bahwa Lemhannas RI yang didirikan oleh Presiden Pertama Ir. Soekarno ini merupakan lembaga yang terhormat dan strategis.



“Sehingga, kami para pejabat dan staf yang berada di lingkungan Deputy Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional ini selalu memotivasi diri untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik semaksimal mungkin agar mampu menjadi pimpinan tingkat nasional sebagai upaya Lemhannas RI untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” jelas Rahmat.

Oleh karena itu tak jarang juga Rahmat yang dilantik sebagai Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional pada bulan Juni lalu juga sering mengingatkan kepada para pejabat dan anggota lainnya di lingkungan Deputy Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional untuk menjaga kehormatan Lemhannas RI.

Hal penting lainnya bagi Rahmat yang sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional

Lemhannas RI adalah memberikan sumbangsih kinerja Deputy Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional kepada Lemhannas RI dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI.

Di masa pandemi ini, tidak menghambat operasional pendidikan karena berbagai program kegiatan telah menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada dengan pelaksanaan pendidikan secara daring (daring) tanpa mengurangi kualitas hasil pendidikan. Rahmat mengungkapkan, meskipun tetap ada kegiatan tatap muka, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tetap menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan Pemerintah.

# Lemhannas RI Butuh Lebih Banyak Milenial

**T**im redaksi Majalah Swantara kali ini berkesempatan mewawancarai salah satu dari sekian banyak CPNS Lemhannas RI yang lolos dalam rangkaian Seleksi Penerimaan CPNS Lemhannas RI Tahun 2018 silam. Arya Pambudi S.Hum atau yang akrab disapa Arya ini bertugas sebagai Analis Penelitian dan Pengembangan Seksi Pultajiankumham Subdit Jiankumham Ditjian Sosbud Debidjianstrat Lemhannas RI. Kini ia berbagi pengalaman hidupnya sejak kecil hingga bekerja sebagai PNS di Lemhannas RI meski masih seumur jagung.

Sederhana namun memiliki nilai-nilai keluarga yang mengakar dengan kuat, seperti itulah Arya mendeskripsikan bagaimana keluarganya. Ia merasa beruntung karena terlahir di keluarga yang bukan berlebih tetapi fungsional. Fungsional dalam hal ini bermakna masing-masing anggota keluarga fokus terhadap tugas dan tanggung jawabnya, ayah selaku kepala keluarga bekerja sebagai pencari nafkah dan ibu selaku pendidik putra-putri di rumah. Pria kelahiran Tangerang, 4 Maret 1984 ini mengaku sangat terinspirasi oleh ayahnya yang saat ini masih bekerja sebagai Dosen Tarbiyah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pendidikan Dasar Arya ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah yang masih berada di dalam kompleks Dosen UIN Syarif Hidayatullah.

Anak ketiga dari 5 bersaudara ini menghabiskan masa kecilnya di Tangerang dan kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di SMAN 47 Jakarta, sempat mengalami *culture shock* dalam segi pergaulan dari sekolah Islam ke sekolah umum namun hal tersebut tidak berlangsung lama.

Setelah lulus SMA, sama seperti anak-anak lainnya, ia mencoba peruntungan dengan mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan diterima di 2 (dua) Universitas Negeri sekaligus, UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Indonesia. Setelah berbagai pertimbangan, pada akhirnya pilihannya jatuh ke Universitas Indonesia dengan Jurusan Ilmu Sejarah.

Lulus kuliah tahun 2008, sebenarnya ia pernah mencoba mendaftar sebagai CPNS di Kementerian Pariwisata namun kali itu ia belum beruntung. Tak putus asa, ia kemudian mendaftar ke berbagai perusahaan lewat *Job Fair* di Universitas Indonesia, dari 3 perusahaan yang telah membuka peluang untuknya, ia memilih jalur karir pertamanya di International SOS, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang kesehatan.

Beberapa perusahaan yang pernah dilaluinya antara lain di Manufaktur sepatu Nike, dan PT Arthaasia Finance yang merupakan salah satu anak usaha dari Merk ternama asal Jepang, Hitachi. Dan pada akhirnya setelah berkarir selama 10 tahun di sektor swasta, barulah kesempatan itu menjadi miliknya. Arya kini menjadi PNS Lemhannas RI setelah memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan terakhirnya. Pengalaman ini tentu membuatnya sangat memahami dinamika dan beban kerja yang terhitung padat di sektor swasta.

Redaksi Swantara sempat menyinggung bagaimana perbandingan “angka” yang diperolehnya selama bekerja di perusahaan multinasional lalu beralih menjadi PNS golongan III/A di umurnya saat ini, Arya menjawab dengan bijak.

“Jadi gini, ayah banyak memberi

nasihat bahwa pekerjaan itu adalah *lifelong partner*, pekerjaan adalah sesuatu yang melengkapi hidup kita, bagaimanapun pekerjaan akan mempengaruhi hidup, jadi orientasinya nomor satu adalah tentang hidup. Hidupnya berkualitas atau engga. Nah untuk menunjang hidup yang berkualitas itu pastinya banyak kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Nah materi itu bukan satu satunya kriteria untuk meningkatkan kualitas hidup, uang jelas menunjang, tapi bukan nomor satu, nomor satu adalah kenyamanan.” jelasnya.

“Nah nyaman ini kan faktornya banyak ya, ada dari sisi beban pekerjaan, lingkungan prospek karir, lokasi, kecocokan substansi, dan lain lain. Dari sekian faktor aku merasa disini adalah *the best place that I have ever work*, Alhamdulillah bersyukur banget, dan berusaha berkontribusi,



Arya Pambudi, S.Hum.

karena Lemhannas udah baik banget sama aku.” pujinya terhadap Lemhannas RI.

“Dulu pengalaman kerja di perusahaan pertama namanya juga swasta pasti beban kerja dan pressure yang tinggi, ada juga yang lokasinya kurang pas, jauh gitu dari rumah dan di perusahaan terakhir aku kurang sejalan dengan konsep bisnisnya. Sampe akhirnya aku keluar dan saat udah di Lemhannas *alhamdulillah* bisa punya *work-life balance* yang mungkin semua orang pengen. Selain itu Bangga banget bisa masuk Lemhannas di waktu yang istilahnya tepat, karena aku baru keluar juga dari perusahaan sebelumnya.” ungkapnya menjelaskan perbedaan bekerja di sektor swasta dan di lembaga pemerintah.

Disela-sela kesibukannya, ayah 2 orang anak ini memiliki hobi bermusik. Ia mengaku bahwa ia memang memiliki ketertarikan lebih terhadap musik sama seperti ayahnya. Selain itu otomotif dan olahraga juga menjadi hal-hal yang disenanginya. Yang menarik ketika ditanya mengenai cita-cita, ia mengungkapkan dengan sederhana konsep takaran kodrat.

“Cita-cita apa ya, mungkin cuma pengen hidup lurus aja. Karena biasanya kalo berdoa tuh ya ngga muluk-muluk, cuma pengen bisa menjalani kodrat dan takdir sebaik-baiknya udah itu aja, ngga ingin yang berlebihan, kan semua orang sudah punya takarannya masing-masing dan aku hanya ingin memenuhi takaran tersebut. Dan ngga pengen jadi orang yang berlebihan.” paparnya

Seleksi Penerimaan CPNS Lemhannas RI ia lalui tanpa ada motivasi apapun. Baginya tak ada yang salah dengan mencoba dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Ketika sampai pada tahap kelulusan, orang-orang di sekitar mengungkapkan kebahagiaannya dan ia pun turut merasa bangga atas pencapaiannya. Menariknya, ia mengungkapkan bahwa motivasi itu dapat dibentuk setelah kita mendapatkan hal tersebut (bekerja di Lemhannas) “Jadi aku merasa motivasi aku semakin terbentuk kenapa aku jadi PNS justru setelah aku masuk kesini.” timpalnya

Tahun pertama bekerja di Lemhannas RI menurutnya sangat

berkesan, karena tidak seperti di K/L lain. Lemhannas RI terdiri dari beragam jenis personel, yakni TNI, POLRI dan ASN. “Disitu luar biasa banget kita lebih banyak ketemu dengan militer sempet agak merasa kaget, tapi disisi lain enak dan bermanfaat juga untuk kedepannya.” kenangnya melalui tahun pertamanya di Lemhannas RI.

Disisi pekerjaan sehari-hari, Arya mengungkapkan bahwa selama mengemban tugasnya di Deputy Bidang Pengkajian Strategik ia merasakan nilai-nilai kekeluargaan yang erat, fleksibilitas waktu dan kenyamanan seperti di rumah. “Jadi aku ngerasain banget perbedaannya antara pekerjaan aku yang dulu dengan yang sekarang, *alhamdulillah* bersyukur banget sekarang untuk bangun pagi dan berangkat kerja ngerasa paling enjoy itu ya disini.” ungkapnya.

Namun tiada gading yang tak retak, setiap hal memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ia juga menambahkan hal-hal yang perlu ditingkatkan dari Lemhannas RI yakni adanya standarisasi pekerjaan, “Disini menurutku perlu dibuat standar kinerja pegawai beserta PIC yang bertanggungjawab.” tambahnya.

Sebagai pegawai baru Arya banyak menaruh harapannya terhadap Lemhannas RI antara lain sistem merit. Menurutnya hal tersebut perlu sekali diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada, bukan hanya masalah formalitas, semua ketentuan-ketentuan administratif yang telah ditetapkan jika dipedomani dengan baik maka akan menjadi suatu kemajuan yang signifikan.

“Menurutku seperti penilaian SKP itu penting sekali jika benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh bisa menjadi salah satu instrumen perbaikan organisasi.” ungkapnya.

Hal lainnya yang menjadi perhatian adalah soal *recruitment*. Ia berpendapat bahwa *open recruitment* adalah hal yang sangat penting walaupun bukan jaminan utama suatu organisasi akan berjalan dengan baik.

“Aku merasakan langkah besar yang diambil Lemhannas ini adalah dengan adanya *open recruitment*, sistem yang jujur, itu udah suatu langkah kemajuan banget, tinggal dikelola aja SDM yang sudah ada dan

cara kerjanya dengan memanfaatkan metode-metode yang sudah baku, baku ya bukan kaku.” tambahnya

“Harapan aku, jumlah anak muda diperbanyak, karena salah satu cara menilai organisasi adalah dari SDM nya, karena kebetulan aku HRD di tempat lama, jadi SDM itu adalah modal utama kemajuan suatu organisasi.”

“Jadi SDM itu terbagi menjadi 4 kuadran berdasarkan kemauan dan kemampuannya, kategori pertama yakni orang yang punya kemampuan tinggi dan kemauan untuk melakukan perubahan itu yang disebut sebagai *The Rising Star*, kategori orang-orang emas. Kemudian kategori kedua alias *Potential Candidate*, dia sebenarnya ngga mampu, ngga pintar-pinter banget tapi mau untuk melakukan perubahan. Nah kita bisa mengembangkan ini, adalagi kategori ketiga yaitu orang-orang yang pintar dan berkemampuan tetapi tidak mau melakukan perubahan itu namanya *Under Achiever* itu agak berat sih menurutku, masih mendingan yang nomor 2 dan yang terakhir yang paling parah yakni *Dead Wood*, udah ngga pintar dan ngga mau. Tapi aku berharap ada regenerasi minimal yang ada di kuadran kedua dari situ baru kita bisa susun bareng dengan metodenya yang sudah ada dan SDM yang bagus insya Allah Lemhannas bisa lebih maju.” paparnya.

Selain harapan umum bagi Lemhannas RI, ia juga memiliki harapan khusus bagi Deputy Bidang Pengkajian Lemhannas RI. “Khusus untuk pengkajian aku berharap outputnya semakin berkualitas dan semakin menjadi rujukan presiden. Kembali lagi ke fitrahnya dulu bung karno menyatakan bahwa negara ini butuh *think tank* alias ahli-ahli strategi karena perubahan konstelasi politik dunia dari negara-negara kolonial menjadi New Emerging Forces (NEFO).”

“Kalo kita lihat sekarang tiap-tiap lembaga udah punya pusat kajiannya sendiri. Harapanku Pengkajian Lemhannas bisa menjadi salah satu dari sekian banyak kajian yang menjadi rekomendasi bagi presiden dan Lemhannas RI berada pada jajaran lembaga-lembaga bergengsi dalam hal kajian strategi.” ungkapnya dalam menutup wawancara ini.



Sumpah Pemuda  
**BERSATU BANGKIT**

# PERINGATAN **SUMPAH PEMUDA**

Berbahasa yang satu, Bahasa Indonesia

Berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia

Bertumpah darah yang satu, Tanah Air Indonesia



## Zona Merah Bertambah, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

**S**udah sembilan bulan pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia. Kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Hingga hari ini, Rabu (2/12), belum terlihat penularan Covid-19 dapat dikendalikan. Hal itu tampak dari masih banyak anggota masyarakat yang terpapar Covid-19 hingga Selasa (1/12). Penambahan pasien positif tercatat lebih dari 5.000 dalam sehari. Total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 543.975 orang.

Zona merah naik drastis. Pada Selasa, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menggelar konferensi pers yang menjelaskan perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia. Wiku menyatakan kecewa karena jumlah daerah yang masuk status zona merah naik cukup drastis.

Pada saat yang sama, Wiku mengungkapkan adanya penurunan jumlah daerah dengan status zona hijau. "Saya sangat kecewa karena pada periode ini jumlah kabupaten/

kota zona merah bertambah hampir dua kali lipat dibanding pekan sebelumnya. Selain itu, jumlah daerah zona hijau pun semakin menipis," ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan kanal YouTube BNPB, Selasa.

Berdasarkan data yang dihimpun Satgas hingga 29 November 2020, tercatat ada 50 kabupaten/kota berstatus zona merah atau berisiko tinggi. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya yang tercatat sebanyak 28 kabupaten/kota berstatus zona merah. Dari data yang sama, tercatat jumlah daerah berstatus zona hijau tak ada kasus sebanyak enam kabupaten/kota.

Jumlah ini berkurang daripada sebelumnya, di mana tercatat 10 kabupaten/kota berstatus zona hijau. Kemudian, zona hijau tak terdampak Covid-19 juga mengalami penurunan dari 10 kabupaten/kota menjadi 9 kabupaten/kota. Selain itu, daerah zona oranye atau risiko sedang jumlahnya meningkat menjadi 374 kabupaten/kota dari sebelumnya 345 kabupaten/kota.

Kemudian, daerah zona kuning atau risiko rendah menurun menjadi

75 dari 121 kabupaten/kota. Merujuk pada data tersebut, Wiku mengajak pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mengevaluasi komitmen dalam penanganan Covid-19.

"Keadaan ini juga harusnya menjadi catatan keras bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Bagi masyarakat, jangan pernah abaikan protokol kesehatan," tegas Wiku. "Karena cepat atau lambat Anda akan jadi tertular Covid-19 jika lengah. Kami minta pemda selalu evaluasi penerapan 3M dan 3T di daerah," tambah Wiku.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pemerintah daerah (pemda) tidak lagi mengizinkan masyarakat untuk berkumpul dalam jumlah besar. Hal ini menyusul meningkatnya kasus Covid-19 di DKI Jakarta pada periode 25–30 November 2020 sebanyak 8.598 kasus dibandingkan 5.168 kasus pada periode 28 Oktober–3 November 2020. "Saya ingin kita semua bersepakat jangan ada kerumunan lagi dengan alasan apa pun untuk beberapa waktu ke depan," ujar Luhut pada Selasa (1/12).

Luhut juga meminta agar Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan saling mengecek ketersediaan obat yang ada di daerah. "Jangan sampai ada orang meninggal karena kelalaian kita untuk mengecek ketersediaan obat sehingga obat habis," tutur Luhut. Dia juga meminta agar Kemenkes memastikan kapasitas ICU dan isolasi di RS mencukupi untuk perawatan pasien Covid-19.

Lebih lanjut, Luhut meminta kepada semua pihak yang berwenang untuk turut mengevaluasi pelaksanaan pilkada dan dampak libur panjang pada akhir Oktober terhadap peningkatan kasus terkonfirmasi positif dan angka kematian.

Sumber: nasional.kompas.com



# PBB: Dunia Hadapi Krisis Kemanusiaan Terburuk Sejak PD II

**P**ersekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) membutuhkan dana sebesar USD35 miliar (setara Rp494 triliun) untuk merespons krisis kemanusiaan terburuk sejak berakhirnya Perang Dunia II, ucap Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Pernyataan disampaikan Guterres saat meluncurkan acara 2021 Global Humanitarian Overview.

"Tahun ini, 2020, menjadi tahun yang sangat berbeda. Konflik, perubahan iklim, dan Covid-19 telah menciptakan tantangan kemanusiaan terbesar sejak Perang Dunia II," kata Guterres, dilansir dari laman Tass pada Rabu, 2 Desember 2020.

"Jumlah orang yang berisiko kelaparan bertambah dua kali lipat.

Ratusan juta anak-anak sudah tidak bersekolah. Level kemiskinan ekstrem meningkat untuk kali pertama dalam 22 tahun terakhir," sambungnya.

Guterres mengajak komunitas global untuk membantu mereka yang berada dalam kelompok paling rentan dalam menjalani tahun penuh tantangan ini. Ia menyebut, warga termiskin di dunia memiliki risiko tertinggi terpapar covid-19. Mereka juga merupakan kelompok paling rentan yang hanya sedikit atau bahkan tidak mendapat layanan kesehatan.

Menurut estimasi PBB, pandemi covid-19 dapat membuat 115 juta orang di seluruh dunia jatuh ke jurang kemiskinan tahun ini. Jika ini terjadi, maka akan menjadi lonjakan pertama di bidang kemiskinan global dalam beberapa dekade terakhir.

"Perempuan berada dalam risiko tinggi, karena mereka lebih rentan kehilangan pekerjaan, dan hanya sedikit yang memiliki perlindungan sosial," ujar Guterres.

Karena situasi saat ini tidak biasa, sambung Guterres, maka respons yang diperlukan untuk memerangi kemiskinan harus bersifat luar biasa. "Pandemi ini membutuhkan aksi kolektif yang kuat," ungkapnya.

Mengulang pesan sebelumnya, Guterres mendorong negara-negara global untuk mempercepat transformasi perekonomian dengan berinvestasi di bidang pemulihan berkesinambungan yang ramah lingkungan. "Kita juga membutuhkan program perlindungan sosial baru, yang dapat melindungi orang-orang yang bekerja di sektor informal," sebut Guterres.

Menyikapi hal tersebut, uang USD35 miliar yang diserukan Guterres diharapkan dapat dipakai untuk menyalurkan paket bantuan untuk 160 juta orang-orang paling rentan di seluruh dunia.

Ia juga menekankan pentingnya "membahas akar-akar masalah yang memicu krisis kemanusiaan," yang salah satunya adalah konflik. "Saya menyerukan kepada semua pihak untuk mendukung seruan saya menuju gencatan senjata berskala global di akhir 2020," pungkas Guterres.

Berdasarkan data terbaru Johns Hopkins University pada Rabu (2/12), total kasus Covid-19 di kancah global telah melampaui 63,7 juta dengan 1,4 juta lebih kematian dan 40.956.716 pasien sembuh. Amerika Serikat, India, dan Brasil masih menjadi negara teratas dalam jumlah kasus dan kematian akibat Covid-19.

Sumber: medcom.id



## Apa itu Kacamata Photochromic?

**B**agi orang yang sehari-hari menggunakan kacamata, aktivitas di luar ruangan boleh jadi sesuatu yang tak praktis. Pasalnya, mereka perlu menyiapkan kacamata hitam atau sunglass untuk melindungi mata dari paparan langsung sinar matahari, sekaligus membawa kacamata baca untuk keperluan sehari-hari. Salah satu alternatif agar lebih praktis dan tak perlu repot membawa kacamata dobel adalah menggunakan kacamata photochromic.

Kacamata ini terlihat jernih saat digunakan di dalam ruangan, dan otomatis teduh atau gelap saat digunakan di luar ruangan yang terpapar sinar matahari. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait apa itu kacamata photochromic, fungsi, sampai plus minusnya.

### Apa itu kacamata photochromic dan fungsinya?

Kacamata photochromic adalah jenis kacamata dengan lensa transisi yang adaptif terhadap cahaya. Lensa kacamata ini dapat membantu mata menghadapi kondisi cahaya yang berbeda sepanjang hari. Melansir

Eye Care Trust, fungsi kacamata photochromic utamanya untuk melindungi indra penglihatan dari efek buruk radiasi ultraviolet.

Seperti diketahui, paparan radiasi ultraviolet dari sinar matahari yang berlebihan dapat merusak bagian kornea dan konjungtiva mata. Efek buruk radiasi ultraviolet ini bisa menyebabkan penyakit katarak sampai kanker mata. Kacamata photochromic yang baik dapat memblokir 100 persen sinar matahari, sekaligus bisa beradaptasi dengan perubahan cahaya dan gelap dalam hitungan detik.

Kacamata hitam biasa sebenarnya juga dapat memberikan kenyamanan pada pada saat situasi sangat panas. Namun, kacamata ini kurang nyaman digunakan untuk cahaya yang berubah-ubah. Menurut American Academy of Ophthalmology, lensa photochromic sudah ditemukan sejak beberapa dekade lalu.

Dulunya, lensa kacamata ini pilihannya masih terbatas dengan warna abu-abu. Seiring perkembangan teknologi, kini lensa photochromic tersedia dalam berbagai warna lensa. Lensa kacamata photochromic awalnya dibuat dari

perak klorida atau perak halida. Kini, sebagian besar lensanya dibuat dengan pewarna khusus yang dapat bereaksi saat terkena sinar UV.

Kacamata photochromic biasanya tidak bisa menjadi lebih gelap saat berada di dalam kendaraan. Hal itu disebabkan kaca depan kendaraan menghalangi sebagian besar sinar UV yang masuk. Tapi, sejumlah pabrik kini merilis kacamata photochromic yang tetap aktif saat digunakan di dalam kendaraan.

### Siapa yang perlu menggunakan kacamata photochromic?

Orang yang beraktivitas di luar ruangan dan di dalam ruangan perlu menggunakan kacamata ini agar praktis dan nyaman. Misalkan pemain golf, tenis, sampai guru sekolah yang kerap berada di luar ruangan.

Sedangkan orang yang terpapar panas ekstrem dan tingkat UV yang tinggi lebih memerlukan kacamata hitam dengan proteksi maksimal ketimbang kacamata photochromic. Namun untuk aktivitas sehari-hari, kacamata dengan lensa photochromic sudah cukup untuk melindungi mata saat berada di luar ruangan.

Sumber: [health.kompas.com](http://health.kompas.com)



# Mengenal Beragam Makna dan Tradisi di Jatiluwih, dan Sekitar Tabanan, Bali



**B**erlibur di alam terbuka sambil menikmati suasana pedesaan memang bisa menjadi obat ampuh untuk rileks sejenak dari aktivitas yang padat. Apalagi, bisa sambil menikmati keindahan ragam budaya masyarakat yang tetap dijaga kelestariannya. Seperti halnya saat kita berkunjung ke objek wisata Terasering Jatiluwih.

Memang, Pulau Bali menyuguhkan banyak tradisi warisan leluhur yang hingga kini tetap dilestarikan oleh masyarakat setempat. Tradisi-tradisi tersebut pun menyuguhkan hal unik dan makna tersendiri sebagai sebuah kerarifan lokal di dalam kehidupan masyarakat.

Nah, di Tabanan sendiri memiliki tradisi-tradisi yang hingga kini tetap dijalankan oleh masyarakat yang menjadi daya tarik wisatawan saat berwisata ke Jatiluwih, Tabanan dan sekitarnya. Mau tahu apa saja tradisinya? Simak ulasannya berikut ini.

**Tradisi Mesuryak.** Tradisi di Tabanan yang digelar setiap 6 bulan sekali atau 210 hari dalam kalender Bali. Tradisi ini dilakukan saat hari raya Kuningan atau 10 hari setelah hari Raya Galungan. Makna dari tradisi Mesuryak memiliki arti tersendiri yakni, untuk memberikan bekal dan mengantarkan roh leluhur untuk kembali ke alam Nirwana dengan suka cita.

**Tradisi Iyangket.** Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memuja Dewa Nini yang merupakan simbol dari manifestasi Dewi Sri yang dipercaya oleh masyarakat Bali sebagai Dewi pemberi kesuburan dan

kemakmuran para petani. Ritual khusus ini dilaksanakan oleh masyarakat Tabanan dari mulai masa tanam hingga panen beras merah dan beras Bali selesai.

**Tradisi Okokan.** Tradisi unik di Tabanan yang diyakini sebagai upaya menolak bala atau yang biasa disebut dengan Nangluk Merana. Biasanya, Tradisi Okokan ini dilaksanakan oleh warga Tabanan, khususnya yang berada di Banjar Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Tabanan. Tradisi ini juga biasanya dilakukan pada saat-saat tertentu misalnya, pada saat sedang ada wabah penyakit yang ada di Desa.

**Ritual Mayunan.** Tradisi ini dipercaya sebagai tradisi yang sangat sakral, karena, tradisi ini dilaksanakan 10 tahun sekali saat Rahina Buda Kliwon Pahang Nemu Sasih Kapat atau dalam kalender Bali diartikan sebagai bulan keempat. Dalam ritual ini ada yang dinamai dengan ayunan sakral yang terbuat dari bahan kayu campaka yang disebut dengan Ayunan Jantra. Uniknya, tidak semua anak boleh menaiki Ayunan Jantra ini. Anak-anak yang boleh naik ke atas ayunan harus melalui proses nyanjan yang ditandai dengan kerauhan atau kesurupan saat warga sedang melakukan persembahyangan Karya Pujawali di Pura Kawitan Undagi Beratan.

Semua keunikan tradisi masyarakat ini bisa disaksikan di Jatiluwih dan sekitarnya di Kabupaten Tabanan. Tentu, akan menjadi pengalaman tak terlupakan, berlibur di alam terbuka sambil memetik pelajaran berharga dari sebuah tradisi dan kearifan lokal.

Sumber: [Travel.okezone.com](http://Travel.okezone.com)

# Sinergitas Pusat dan Daerah adalah Kunci Tangani Pandemi.

Syamsul Auliya Rachman S.STP, M.Si.  
Wakil Bupati Cilacap

Syamsul Auliya Rachman S.STP, M.Si, yang menjabat sebagai Wakil Bupati Cilacap periode 2017-2022 ini berbagi pengalamannya dalam mengikuti Program Pemantapan Pimpinan Tingkat Daerah (P3DA) 11 Lemhannas RI.

Salah satu hal yang dikagumi dari program ini adalah antusiasme

peserta yang luar biasa. "Saya sangat terkesan selama menjadi peserta program Pemantapan Daerah



Angkatan 11 (P3DA) di Lemhannas RI. Meski diselenggarakan secara Daring, tapi ternyata seluruh peserta sangat antusias dan disiplin dalam melaksanakan kegiatan ini."

Kesempatan bertemu dengan pimpinan daerah lain adalah hal yang paling berkesan lainnya, para pimpinan daerah ini bertukar gagasan dan pemikiran mengenai penerapan kebijakan di daerahnya masing-masing walau gerak dan jarak yang membatasi, tetapi cahaya ilmu dan gagasan itu terus berpendar tak terbatas, baik yang bersumber dari pemateri atau sesama peserta.

"Dan bagi saya tentunya ilmu yang saya peroleh selama mengikuti diklat ini sangat bermanfaat untuk diterapkan di daerah saya. Baik itu ilmu yang diperoleh dari para narasumber maupun dari hasil sharing sesama peserta." Jelasnya.

"Pada awalnya memang cukup sulit untuk menyesuaikan jalannya diklat, dikarenakan secara Daring. Tetapi lama kelamaan karena harus tetap dilaksanakan dan diikuti, maka jadi sudah terbiasa. Mungkin sesama peserta jadi belum bisa saling mengenal secara dekat karena tidak bisa sering bertemu/bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa menjalani kehidupan secara normal lagi." ujarnya menjelaskan tantangan dalam mengikuti program P3DA XI ini.

Ia berharap, selaku penyelenggara program ini, Lemhannas RI dapat terus

meningkatkan kualitas serta inovasi dalam setiap proses pembelajarannya. "Terus meningkatkan kualitas tentunya penyelenggaraan diklat yang sudah baik ini agar bisa dipertahankan. Syukur bisa ditingkatkan lagi. Mungkin dengan adanya variasi serta inovasi lainnya dalam penyelenggaraan." Tambahnya.

Dalam sudut pandang pimpinan daerah, syamsul mengungkapkan pandangannya mengenai Pandemi COVID-19. Salah satu hal yang dapat ditingkatkan adalah sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengatasi peningkatan jumlah kasus positif.

"(Pandemi COVID-19) merupakan "Bencana Dunia" bukan hanya di Indonesia, bahkan Negara yang sangat maju pun bisa terkena dampaknya. Sangat diperlukan sinergitas dari tingkat pusat sampai tingkat daerah bahkan sampai pelosok desa." jelasnya.

"Pandemi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Kita harus bahu membahu dalam menangani wabah ini. Keselamatan rakyat di atas segalanya. Protokol kesehatan wajib dijunjung tinggi. Dan kita harus bisa beradaptasi dalam kehidupan baru (*New Normal*) yaitu dengan selalu memakai masker bila bepergian, jaga jarak, dan selalu rajin cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*." Ujarnya menutup wawancara ini.

# Pembelajaran Aplikatif sesuai Perspektif Kedaerahan

Yusuf Muhammad, S.E., M.SM  
Wakil Walikota Lhokseumawe

Disela-sela kesibukan menjalankan tugas sebagai wakil Walikota Lhokseumawe, Yusuf Muhammad, S.E., M.SM juga menjadi salah satu peserta program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan XI ini. Baginya mengikuti program ini adalah sebuah kesempatan dalam mengembangkan wawasannya sebagai pimpinan daerah,

“Banyak hal-hal yg kami peroleh pada saat kami mengikuti pendidikan ini selama hampir tiga bulan terutama menyangkut Wawasan Nasional, permasalahan yg terjadi saat ini Pandemi COVID-19, pengembangan diri dalam menghadapi tantangan, tentang Trigatra dan tatacara olah sismennas dan lain-lain.” Jelasnya.

Yusuf menambahkan bahwa pembelajaran di Lemhannas RI adalah pembelajaran yang aplikatif dan sangat sesuai dengan permasalahan strategis dalam perspektif kedaerahan. “Apa yang kami dapatkan merupakan ilmu baru yang selama ini mungkin belum pernah kami dapatkan sebagai praktisi, teori dan aplikasi yang kami dapatkan disini selama masa orientasi pendidikan ini sangat berguna untuk pengembangan di daerah masing bagi anggota P3DA XI itu sendiri.” tambahnya.

Baginya, program-program pendidikan yang diberikan kepada peserta sangat bagus dan efektif untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang pembangunan yang berakar pada kearifan lokal untuk menguatkan

pembangunan yang berwawasan Nasional.

Kesempatan yang sangat berharga ini menurutnya perlu sekali diterapkan bahkan sebelum pemimpin daerah mengemban tugasnya. “Kedepan sebaiknya semua calon-calon pimpinan daerah diharuskan terlebih dahulu memperoleh pendidikan di Lemhannas yang terhormat ini supaya konsep-konsep Pembangunan Nasional akan terlaksana.” jelasnya.

Disamping berbagai antusiasme yang dirasakan, rupanya terdapat tantangan tersendiri dalam mengikuti program pendidikan secara daring ini. Kendala dan tantangan rupanya terletak pada minimnya kekompakan sesama peserta dan kesempatan untuk saling mengenal dan *sharing* pengalaman secara langsung. “Bahkan ada di antara sesama anggota tidak saling mengenal.” tambahnya. Diantara banyaknya manfaat yang didapatkan dari pembelajaran daring, hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi yang mungkin tak dapat

dihindari karena ruang interaksi yang terbatas.

Pandemi COVID-19 kini telah menemui titik terang dengan datangnya 1,2 juta vaksin SINOVAC di Indonesia. Tapi lebih dari itu, perjuangan yang sesungguhnya belum usai. Para pimpinan daerah ini masih terus berjuang melakukan tindakan strategis dalam upaya mengurangi angka kasus positif di daerahnya.

“Hal paling penting adalah komunikasi publik yang baik, edukasi, terlepas dari adanya teori-teori konspirasi yang bertebaran di masyarakat dan pemahaman yang minim seperti sakit, tertular, meninggal dan lain-lain adalah nyata.” jelasnya. Penanganan yang kita lakukan saat ini adalah suatu ikhtiar yang sangat bagus dan terus harus ditingkatkan agar banyak daerah-daerah di seluruh Indonesia terlepas dari pandemi ini.



# SINERGI PUSAT DAN DAERAH MENUJU NEW NORMAL PANDEMI COVID-19 UNTUK KESELAMATAN SELURUH BANGSA

**Siti Markhamah, S.Pt., M.Han.**

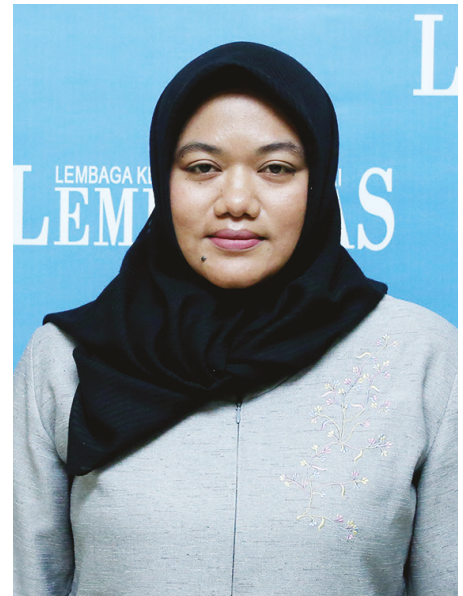
## PENDAHULUAN

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” merupakan salah satu dari catur embanan, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, amanah Undang-undang yang perwujudannya harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Adanya pandemic covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia merupakan salah satu tantangan terhadap upaya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tersebut.

Pemerintah dari seluruh negara di dunia saat ini tengah diuji kepemimpinannya oleh pandemi tersebut. Pemerintah Indonesia pun menghadapi permasalahan serupa. Sejak pertama kali dinyatakan bahwa Indonesia terjangkit virus corona pada awal maret hingga saat ini, pandemi telah menyebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia sehingga penanganan covid-19 tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah pusat namun juga menjadi tantangan bagi seluruh pimpinan daerah yang ada di Indonesia. Untuk dapat mengatasi pandemi yang telah menyebar ke seluruh provinsi dari semula hanya Jakarta sebagai episentrum pertama, perlu ketegasan dan kejelasan kebijakan pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah daerah.

Namun yang terjadi saat ini ketidakkompakan pemerintah pusat dan daerah sangat terlihat dengan adanya kebijakan yang saling menegasikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Melalui situs resmi Ombudsman Republik Indonesia, lembaga tersebut memberikan pernyataan bahwa kebijakan pusat sering tidak konsisten dan menghambat keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam penanganan pandemi covid-19. Masih menurut Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, pemerintah Indonesia sesungguhnya memiliki peran sentral untuk dapat memutus penularan virus serta memiliki peran strategis untuk mengkoordinasikan pemerintah daerah dalam upaya penanganan virus covid-19, namun peran tersebut belum optimal. Ombudsman Republik Indonesia juga menyorot kebijakan pemerintah pusat untuk menerapkan *new normal* dinilai tergesa-gesa ditengah angka penderita dan korban covid-19 yang masih terus bertambah.<sup>1</sup>

Istilah *new normal* mulai dikenalkan dan didefinisikan sebagai upaya untuk menjadi produktif dalam masa Pandemi covid-19 ini. Dalam konteks bencana adalah bagaimana kita beradaptasi dengan ancaman yang masih ada di sekitar kita, sementara kita harus hidup sebagaimana normalnya jika tidak ada ancaman, namun tetap melindungi diri



agar tidak terkena ancaman tersebut. Meski *new normal* akan diterapkan secara bertahap dengan terlebih dahulu menyiapkan berbagai protokol keselamatan yang harus diikuti oleh masyarakat untuk kembali beraktivitas sebagaimana sediakala, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk keberhasilan *new normal* tersebut. Keberhasilan *new normal* sendiri diukur dari berkurangnya tingkat penularan seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada saat ini berupa ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, tulisan ini akan mengulas tentang sinergi yang diperlukan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengupayakan *new normal* pada masa pandemic covid-19 agar keberhasilan transisi menuju *new normal* tersebut dapat melindungi keselamatan seluruh bangsa.

## PEMBAHASAN

### Teori Sinergi dan Pengambilan Keputusan Multilevel

Sinergitas antara pemerintah

pusat dan daerah perlu dibangun dan diperkuat khususnya dalam upaya mempersiapkan *new normal* pandemic covid-19. Dengan sinergi pusat dan daerah, keberhasilan transisi menuju *new normal* dapat diupayakan secara lebih maksimal untuk dapat menekan laju penularan dan untuk melindungi lebih banyak jiwa dan menekan jumlah korban jiwa. Terdapat teori yang relevan untuk mendiskusikan sinergi pemerintahan multilevel, yaitu teori sinergi, dan teori pengambilan keputusan pada multilevel. Teori sinergi disampaikan oleh Berhard Benecke, et. al. pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa sinergi merupakan sebuah sistem atau proses yang menggambarkan kemampuan dua atau lebih unit bisnis atau institusi untuk dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari bekerjasama lebih dari jika

mereka bekerja sendiri-sendiri. Sinergi dari dua unit bisnis tersebut akan memberikan hasil yang lebih besar dari jumlah akumulatif apabila mereka bekerja sendiri-sendiri.<sup>2</sup> Untuk membangun sinergitas diperlukan beberapa hal yang harus dibangun bersama oleh setiap unit yang berkehendak untuk bersinergi yaitu (1) kepercayaan, (2) menghargai satu sama lain, (3) komunikasi, (4) kesamaan visi dan tujuan, (5) komitmen.<sup>3</sup>

Dalam multilevel decision making theory terdapat dua pola interaksi pada proses pengambilan keputusan pada pemerintahan multilevel yaitu (1) interaksi yang informal, yang tidak hanya tentang struktur level kepemimpinan yang telah ditentukan secara institusional (2) interaksi yang lebih prosedural sebagaimana diatur oleh struktur

dan susunan institusional. Kedua interaksi tersebut berkontribusi dan sama pentingnya pada keberhasilan pengelolaan pemerintahan multilevel. Namun demikian setiap pemerintahan multilevel memiliki pola interaksi dan pola yang berbeda-beda untuk keberhasilan proses tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan 5 hal krusial dalam membangun sinergi sebagaimana disampaikan oleh Denise Federer, berikut ini hal-hal yang perlu dibangun untuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam transisi menuju *New normal* Pandemi Covid-19

- a. Kesamaan Visi dan tujuan  
Kesamaan Visi dan tujuan merupakan sebuah keniscayaan dalam membangun sinergi. Tanpa ada kesamaan visi dan tujuan sinergi tidak mungkin dilakukan karena sinergi merupakan upaya





untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penanganan *covid-19* ini, menurut ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah Pusat dinilai belum memiliki visi yang jelas dalam penanganan *covid-19*. Keputusan pemerintah pusat untuk segera menetapkan *New normal* dalam kondisi jumlah positif *covid* dan korban meninggal masih terus bertambah.<sup>5</sup> Untuk keberhasilan transisi menuju *new normal*, pemerintah pusat dan daerah sebelumnya harus menyetujui visi dan tujuan yang sama. Untuk tujuan keselamatan seluruh bangsa, upaya untuk menghentikan pandemi, dan menyelamatkan lebih banyak nyawa sudah semestinya menjadi prioritas utama. Untuk itu pemerintah pusat perlu menetapkan prasyarat atau kriteria yang jelas kapan transisi menuju *new normal* pandemi *covid-19* dapat dilakukan. Misalnya dengan mempertimbangkan tingkat

penularan, tingkat kesembuhan, kesiapan infrastruktur kesehatan khususnya layanan test *covid* yang mudah diakses oleh masyarakat dan lain sebagainya. Dengan demikian ketika pemerintah pusat menetapkan prasyarat kapan daerah dapat mulai menerapkan *new normal* tanpa mengabaikan keselamatan warga, pemerintah daerah dapat menyesuaikan dan memulai ketika daerah yang mereka pimpin telah memenuhi prasyarat tersebut.

- b. **Komitmen terhadap tujuan bersama**  
Melindungi segenap bangsa merupakan komitmen bersama yang tidak dapat ditinggalkan dalam penanganan *covid-19*, termasuk dalam masa transisi menuju *new normal*. Untuk dapat bersinergi, pemerintah pusat dan daerah perlu untuk membangun komitmen bersama dalam penanganan *covid-19*.

- c. **Membangun Kepercayaan Pusat dan Daerah**  
Saling percaya adalah persyaratan penting untuk membangun sinergi. Saat ini, dalam konteks *covid-19* pemerintah pusat dan daerah belum terbangun rasa saling percaya, sehingga mengakibatkan banyak kebijakan penanganan dari pemerintah pusat dan daerah tampak saling menegasikan. Kepercayaan dapat dibangun dengan keterbukaan. Pemerintah daerah perlu memberikan informasi dan data secara transparan kepada pemerintah pusat mengenai penyebaran virus, banyaknya masyarakat terdampak, kapasitas fasilitas kesehatan, kapasitas Keuangan daerah untuk penanganan *Covid* dan lain sebagainya. Pemerintah juga perlu terbuka dengan ketersediaan sumberdaya yang ada pada Pemerintahan pusat. Dengan adanya keterbukaan akan timbul rasa memahami dan percaya terhadap setiap

keputusan strategis yang diambil baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

- d. Terbangunnya saling menghargai antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sikap saling menghargai antara pemerintah pusat dan daerah perlu untuk dipelihara agar pemerintah pusat dan daerah dapat bekerjasama dengan baik. Saling menghargai tersebut dapat dilakukan dengan memahami keputusan yang diambil dari kedua belah pihak dalam memutuskan untuk transisi menuju *new normal* dengan kondisi yang sudah ada. Menghargai kewenangan masing-masing sebagaimana telah diatur dalam sistem manajemen nasional juga sangat perlu sehingga tidak akan terjadi kebijakan yang saling menegasikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

- e. Membangun Komunikasi yang Efektif  
Komunikasi yang efektif merupakan hal krusial untuk dapat membangun sinergitas. Kebijakan-kebijakan yang diputuskan terutama oleh pemerintah pusat dikomunikasikan sebaik mungkin kepada pemerintah daerah karena pemerintah daerah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dari pusat. Adapun jika terjadi ketidaksepahaman atau keberatan dari pemerintah daerah atas kebijakan *New normal* dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menyampaikan argumennya dan demi kepentingan keselamatan warga, kebijakan terbaik dapat diputuskan bersama.

## PENUTUP

Keputusan untuk menerapkan *New normal* pada masa Pandemi Covid merupakan keputusan yang harus dipertimbangkan dengan baik terlebih pada masa persebaran virus masih sangat massif, tingkat penularan dan kematian tinggi. Untuk dapat mengimplementasikan *New normal* pada masa Pandemi Covid tanpa membahayakan keselamatan warga merupakan hal yang penting dan hanya bisa dilakukan apabila Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersinergi dengan baik. Untuk dapat membangun sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu untuk (1) memiliki rasa kepercayaan, (2) menghargai satu sama lain, (3) komunikasi, (4) kesamaan visi dan tujuan, (5) komitmen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Federer, Denise. (2013)., "How to build team synergy" dalam Majalah Business Observer 2013
- Gehard, Beneke, et. al., (2007). "Towards a Substantive Theory of Synergy" dalam *South African Journal of Human Resources Management Volume 5 No 2*
- Hamdi, Imam. 2020. *Ombudsman Sebut Kebijakan Pusat Halangi Keberhasilan PSBB DKI* dalam <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-sebut-kebijakan-pusat-halangi-keberhasilan-psbb-dki-> diakses 4 Juni 16.15
- Setiyono, Y.Y., et. al., 2020. *Sistem Manajemen Nasional*. Lemhannas RI, Jakarta

van Popering-Verkerk, J., & van Buuren, A. (2016). "Decision-making patterns in multilevel governance: the contribution of informal and procedural interactions to significant multilevel decisions" dalam *Public Management Review, Volume 18 Nomor 7 halaman 951-971*.

Yulianto, Achmad, et. al., 2020. *Materi Pokok Sub Bidang Studi Pancasila*. Lemhannas RI, Jakarta

## ENDNOTES

1. Hamdi, Imam. 2020. *Ombudsman Sebut Kebijakan Pusat Halangi Keberhasilan PSBB DKI* dalam <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-sebut-kebijakan-pusat-halangi-keberhasilan-psbb-dki-> diakses 4 Juni 16.15
2. Gehard, Beneke, et. al., (2007). "Towards a Substantive Theory of Synergy" dalam *South African Journal of Human Resources Management Volume 5 No 2*
3. Federer, Denise. (2013)., "How to build team synergy" dalam Business Observer
4. van Popering-Verkerk, J., & van Buuren, A. (2016). "Decision-making patterns in multilevel governance: the contribution of informal and procedural interactions to significant multilevel decisions" dalam *Public Management Review, Volume 18 Nomor 7 halaman 951-971*.
5. *Op. Cit.* Hamdi, Imam.

## Lemhannas RI dan Komisi I DPR RI Bahas RKA Lemhannas RI T.A 2021

Lemhannas RI mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi I DPR RI pada Senin (21/9), di Ruang Nusantara II DPR RI yang membahas terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Lemhannas RI Tahun Anggaran 2021.



## Pembekalan Ketua Umum IKAL Lemhannas kepada Peserta PPRA 61

Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar memberikan pembekalan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, pada Senin (5/10) secara dalam jaringan (daring).



## Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Janji serta Pelepasan Pejabat Lemhannas RI

Upacara pelantikan ini merupakan ketiga kalinya dilaksanakan berbeda dari biasanya, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia dan bahkan di banyak negara," kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo pada Upacara Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Janji serta Pelepasan Pejabat Eselon, pada Kamis (15/10).







### Lemhannas RI Laksanakan Pengambilan Sumpah PNS Secara Daring

Sebanyak 156 orang mengikuti pengambilan sumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) pada Selasa (3/11). Pengambilan sumpah tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan secara daring, hal tersebut merupakan upaya physical distancing dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19.

### Konferensi Internasional tentang Perempuan, Perdamaian, dan Masyarakat Inklusif

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjono memberikan sambutan pada Acara Pembukaan Konferensi Internasional tentang Perempuan, Perdamaian, dan Masyarakat Inklusif "Building Grounded & Sustainable Peace: Women's Experience in Post Conflict Situation and The Realm of Radicalism" kerja sama Lemhannas RI dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kamis (26/11).



### Olah Sismennas Pertama pada Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA)

Sebagai salah satu rangkaian kegiatan dari Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan 11 (P3DA 11), peserta P3DA 11 melaksanakan Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas) dengan tema "Koordinasi Lintas Sektor Aparatur Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Dalam Menghadapi Bencana" mulai tanggal 30 November 2020 hingga 3 Desember 2020.



## Peluncuran Buku Lemhannas RI

Lemhannas RI meluncurkan 3 (tiga) buku yaitu “Kiprah Lemhannas RI”, “Indonesia Menoedjoe 2045: SDM Unggul Adalah Koentji”, dan “Skenario Indonesia 2035”, serta soft launching (peluncuran awal) buku “Tentara Kok Mikir? Inspirasi Out of The Box Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo” di Ruang Auditorium Gajah Mada Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta, pada Kamis (3/12).



## Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 11 Lemhannas RI Resmi Ditutup

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menutup secara resmi Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 11 Tahun 2020 Lemhannas RI pada Senin (7/12) di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Pancagatra Lt. 1, Lemhannas RI.



## Lemhannas RI Selenggarakan Refleksi Tenaga Pendidik terhadap Proses Belajar Mengajar dalam Kondisi Pandemi COVID-19

Lemhannas RI menyelenggarakan Refleksi Tenaga Pendidik terhadap Proses Belajar Mengajar dalam Kondisi Pandemi COVID-19 pada Kamis (10/12) di Auditorium Gajah Mada Lemhannas RI.





# Selamat Hari Ibu

Untuk Kasih Ibu yang  
Menjadi Perlindungan  
Sejatiku





Lembaga Ketahanan Nasional  
Republik Indonesia



**SELAMAT NATAL  
DAN TAHUN BARU 2021**

